

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PEREDARAN NARKOTIKA DARI MEKSIKO TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RONNA PUSPITA SARI

21323185

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PEREDARAN NARKOTIKA DARI MEKSIKO TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RONNA PUSPITA SARI

21323185

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Peredaran Narkotika Dari Meksiko
Pada Era Presiden Donald Trump Tahun 2017-2021**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
20 Agustus 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Tri Inov Haripa, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
- 4 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the exam board members]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

20 Agustus 2025,



Ronna Puspita Sari

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis lantunkan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umat dan rahmat bagi seluruh alam. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Amerika Serikat terhadap Peredaran Narkotika dari Meksiko Tahun 2017-2021”. Tujuan dibuat nya skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan beberapa ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho serta kemudahan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kepada seluruh dosen Prodi Hubungan Internasional yang telah memberikan seluruh ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai di titik ini.
3. Ibu Karina Utami Dewi, SIP., MA. selaku Kaprodi Hubungan Internasional.
4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A. dan Tri Inov Haripa, S.Hub., Int., M.A. selaku dosen pembimbing yang sudah sabar menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga penulis, Bapak, Mamah, Adik Carissa selaku penyemangat dan pendukung utama penulis dalam segala hal yang penulis lakukan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka. Terimakasih sudah berjuang

sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak serta pendidikan yang tinggi sehingga penulis bisa bertumbuh dewasa menjadi pribadi yang lebih baik. Kesuksesan dan segala hal baik yang penulis dapatkan tentu saja didapatkan dari do'a yang terpanjatkan setiap hari nya dari Bapak, Mamah dan Adik.

6. *To my self*, Ronna Puspita Sari. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa bertahan sampai di titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali merasa lelah. Tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.
7. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Mohammad Ravel Resi Tama S.Hub.Int. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung serta menghibur penulis dalam kesedihan. Tidak pernah bosan mendengar keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Terima kasih Kepada Sahabat seperjuangan Intan Fiona Alfirera S.Hub.Int, Fatma Azahra S.Hub.Int, Salsabilah Oktariani Uzainirisa S.Hub.Int, Nabila Zahra Hairunnisa Salim S.Hub.Int dan Wanda Suryaningrum S.Hub.Int yang sudah menemani penulis sejak menjadi mahasiswa baru tahun 2021 sampai saat ini. Terima kasih telah memberikan motivasi, selalu menyemangati satu sama lain, serta menghibur penulis. Pengalaman yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. *See u on top, guys!*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	15
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	15
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2	17
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA	17
2.1 Hubungan Amerika Serikat dan Meksiko dalam Menghentikan Penyebaran Narkotika	17
<i>2.1.1 Merida Initiative</i>	19
2.2 Kebijakan Amerika Serikat terhadap Narkotika Era Presiden Donald Trump	23
<i>2.2.1 Executive Order 13784</i>	25
<i>2.2.2 Jalur Masuknya Narkotika dari Meksiko ke Amerika Serikat</i>	27
BAB 3	29

ANALISIS <i>CONTENT OF POLICY</i> DAN <i>CONTEXT OF IMPLEMENTATION</i> DAN <i>OUTCOMES</i> PEREDARAN NARKOTIKA AMERIKA SERIKAT DARI MEKSIKO	29
3.1 <i>Policy Goals</i> (Tujuan Kebijakan)	29
3.2 <i>Content of Policy</i> (Isi Kebijakan)	30
3.2.1 <i>Interest Affected</i> (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)	30
3.2.2 <i>Type of Benefits</i> (Tipe Manfaat)	32
3.2.3 <i>Extent of Change Envision</i> (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)	34
3.2.4 <i>Site of Decision Making</i> (Letak Pengambilan Keputusan)	35
3.2.5 <i>Program Implementer</i> (Pelaksana Program)	36
3.2.6 <i>Resources Committed</i> (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)	39
3.3 <i>Context of Implementation</i> (Lingkungan Implementasi)	42
3.3.1 <i>Power, interest, and strategy of actor involved</i> (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)	42
3.3.2 <i>Institution and Regime Characteristic</i> (Karakteristik lembaga dan rezim yang Sedang Berkuasa)	45
3.3.3 <i>Compliance and Responsiveness</i> (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)	47
3.4 <i>Outcomes</i> (Hasil atau Analisis dari <i>Content of Policy</i> dan <i>Context of Implementation</i>)	49
3.4.1 <i>Impact on Society, Individuals, and Groups</i> (Dampak pada Masyarakat, Individu, dan Kelompok)	49
3.4.2 <i>Change and its Acceptance</i> (Perubahan dan Penerimaannya)	53
BAB 4	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Implementasi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Peredaran Narkotika dari Meksiko Tahun 2017-2021	56
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Konsep Teori Implementasi Kebijakan Publik Oleh Merilee S. Grindle	13
Gambar 2. Jalur Narkotika dari Meksiko ke Amerika Serikat	28
Gambar 3. Jumlah Kematian Akibat Overdosis Tahun 2015-2025	51
Gambar 4. Jumlah Kematian Berdasarkan Jenis Obat	52

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
CBHSQ	: The Center for Behavioral Health Statistics and Quality
CHIP	: Children’s Health Insurance Program
CJNG	: Cartel Jalisco Nueva Generación
CMHS	: The Center for Mental Health Services
COC	: Continuum of Care (COC)
CSAP	: The Center for Substance Abuse Prevention
CSAT	: The Center for Substance Abuse Treatment
CSOSA	: Court Services and Offender Supervision Agency
DACA	: Deferred Action for Childhood Arrivals
DEA	: Drug Enforcement Administration
DHS	: Department of Homeland Security
DoD	: The Department of Defense
DOJ	: The Department of Justice
DOL	: The Department of Labor
DOS	: The Department of State
DOT	: The Department of Transportation
DTO	: Drug Trafficking Organizations
ED	: The Department of Education
HHS	: The Department of Health and Human Services
HIDTA	: High Intensity Drug Trafficking Areas
HUD	: The Department of Housing and Urban Development
IMF	: International Monetary Fund

MAT : Medication-assisted Treatment

NAFTA : North American Free Trade Area

NCDAS : National Center for Drug Abuse Statistics

NPS : New Psychoactive Substances

SAMHSA : Substance Abuse and Mental Health Services Administration

SAODAP : Special Action Office for Drug Abuse Prevention

USDA : The United States Department of Agriculture

VA : The Department of Veterans Affairs

WTC : World Trade Centre

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki kebijakan Amerika Serikat terhadap peredaran narkoba dari Meksiko selama pemerintahan Donald Trump (2017-2021). Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemerintah AS menangani penyelundupan narkoba yang masuk melalui perbatasan Meksiko-AS. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan mengkaji kebijakan domestik dan luar negeri AS, termasuk meningkatkan keamanan perbatasan dan bekerja sama dengan pemerintah Meksiko secara bilateral. Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle digunakan yang menyatakan bahwa dua komponen utama mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Studi menunjukkan bahwa kebijakan Trump lebih menekankan keamanan dan penegakan hukum yang ketat daripada strategi diplomatik atau rehabilitatif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu studi hubungan internasional, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan luar negeri AS terkait masalah transnasional seperti perdagangan narkoba. Meskipun beberapa kebijakan berhasil mengurangi arus narkoba pada titik tertentu, dampak jangka panjangnya menunjukkan adanya peningkatan ketegangan diplomatik dengan Meksiko serta tantangan dalam menangani krisis opioid di AS.

Kata-kata kunci: Amerika Serikat, Donald Trump, Meksiko, Narkoba.

ABSTRACT

This research investigates the United States' policy towards drug trafficking from Mexico during the Donald Trump administration (2017-2021). The main focus of this research is to see how the US government deals with drug smuggling coming through the Mexico-US border. This research uses a descriptive approach and examines US domestic and foreign policies, including increasing border security, and cooperating with the Mexican government bilaterally. In this research, Merilee S. Grindle's theory of public policy implementation is used, which states that the two main components influencing successful implementation are the policy content and the implementation environment. Studies show that Trump's policies emphasize security and strict law enforcement rather than diplomatic or rehabilitative strategies. This research is expected to help international relations studies, particularly in understanding the dynamics of US foreign policy regarding transnational issues such as drug trafficking. This is because, although some policies have succeeded in reducing the flow of narcotics at a certain point, the long-term impact shows an increase in diplomatic tensions with Mexico as well as challenges in dealing with the opioid crisis in the US.

Keywords: Donald Trump, Drugs, Mexico, United States.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara Amerika Serikat dan Meksiko sangat baik. Ekonomi, pendidikan, keamanan, dan perdagangan adalah bidang-bidang di mana kedua negara tersebut telah bekerja sama satu sama lain. Karena masalah perbatasan di selatan hubungan Amerika Serikat dan Meksiko menjadi menurun. Perdagangan manusia dan perdagangan narkoba ilegal disebabkan dari kartel yang sebagian besar asalnya adalah dari negara Amerika Selatan sebagai akibat dari masifnya gelombang imigran (Saputra 2022). Perdagangan manusia dan kecanduan narkoba, berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Meksiko dan Amerika Serikat merupakan jalur utama peredaran narkoba di wilayah Amerika (Arsya 2020).

Perdagangan narkoba mencakup pembuatan, distribusi, dan konsumsi obat-obatan yang melanggar hukum, seperti heroin, kokain, ganja, dan methamphetamines. Amerika Serikat adalah pasar narkotika terbesar, sekitar 13 juta orang di Amerika Serikat menggunakan narkoba secara aktif. Secara keseluruhan setiap tahunnya para pecandu telah menyumbang kurang lebih 60 miliar dolar. Di luar methamphetamines dan marijuana, rata-rata warga Amerika Serikat mengonsumsi sekitar 350 ton kokain setiap tahun (Dewi 2015).

Kecanduan narkoba telah mencapai titik di mana hampir tidak ada distrik kongres atau sekolah di Amerika Serikat yang tidak terkena dampak zat terlarang. Dibutuhkan inisiatif kerja sama keamanan yang komprehensif seperti Inisiatif Merida untuk memerangi kejahatan terorganisir, korupsi, dan kekerasan di Meksiko

dan Amerika Tengah karena penyebaran narkoba yang begitu luas di seluruh masyarakat Amerika menunjukkan tantangan mendalam yang ditimbulkan oleh narkoba (Hendix 2007).

Amerika Serikat melakukan upaya untuk menangani perdagangan narkoba ilegal yang telah dilakukan oleh Presiden Nixon memulai perang narkoba pada 17 Juni 1971. Perang melawan narkoba juga merupakan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang diupayakan guna menghentikan perdagangan, pengedaran, dan penggunaan narkotika secara universal (Sandiawan 2022). Nixon mengumumkan pembentukan Biro Tindakan Khusus untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba *Special Action Office for Drug Abuse Prevention (SAODAP)*.

Pada tahun 1973, Nixon membentuk *Drug Enforcement Administration (DEA)*. Organisasi ini adalah lembaga kepolisian khusus yang berfokus pada penggunaan dan penyelundupan obat-obatan terlarang di AS (Sandiawan 2022). Sejak kartel masuk ke negara itu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memerangi organisasi perdagangan narkoba. Pemerintahan Amerika Serikat telah membuat kebijakan pengendalian narkoba pertama sejak tahun 1980 pada bulan November (Fallah dan Putranti 2020).

Semangat perang terhadap narkoba dilanjutkan oleh Presiden Donald Trump. Donald terkenal dianggap agresif, juga memberikan peringatan kepada pemerintah Meksiko agar bekerja sama, yang juga berdampak pada kebijakan Amerika mengenai organisasi pengedaran narkoba. Meksiko terkenal sebagai penyuplai narkoba ke AS. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Meksiko adalah

negara transit untuk hampir 70% ganja, heroin, dan methamphetamine yang dikirim ke Amerika Serikat.

Meksiko juga dikenal dengan negara transit untuk sekitar 90% kokain yang dikirim dari Bolivia, Kolombia, dan juga Peru ke Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat menganggap narkoba disebut permasalahan serta musuh utama karena dampaknya bagi kesehatan serta kualitas kehidupan masyarakat. Ini juga terkait dengan kejahatan dan kekerasan, dan terjadi bukan hanya oleh pengguna narkoba tetapi juga oleh kartel yang bersaing untuk memperdagangkan narkoba (Lamas 2016).

Meksiko menjadi pilihan bagi pengguna narkoba setelah Amerika Serikat menghentikan produksi narkoba di negaranya. Dengan peningkatan produksi dan distribusi narkoba di Meksiko, kelompok kriminal Meksiko menjadi DTO (*drug trafficking organizations*). Amerika Serikat mencoba mengurangi perdagangan kokain pada pertengahan tahun 1980-an dengan menutup Florida sebagai jalur perdagangan dengan Kolombia. Jadi, DTO Kolombia memilih Meksiko sebagai tempat transit untuk mengirimkan kokain mereka ke Amerika Serikat.

Narkotika yang dibuat di Kolombia dikirim ke Amerika Selatan melalui pelabuhan di wilayah pantai pasifik Meksiko, seperti Cancun dan Veracruz, dan dari Guatemala juga dikirim ke negara bagian selatan Meksiko melalui jalur darat (Puspita 2023). Selama kampanye nya, Trump mencap imigran tidak sah dari Meksiko serta menekankan ancaman dari kartel narkoba dan kekerasan Meksiko.

Pengaman perbatasan strategi Donald Trump bertujuan guna menghentikan perdagangan obat-obatan terlarang serta kasus opioid nasional di Amerika Serikat diturunkan (Hartanto dkk. 2022). Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang

di Meksiko telah mencapai titik kritis, dan peningkatan permintaan untuk narkoba, terutama metafetamin dan ganja, mendorong aktivitas ilegal. DTO juga menggunakan lokasi Meksiko yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan narkoba (Saputri 2023).

Kartel Meksiko adalah kartel perdagangan narkoba yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat yang mana itu adalah ancaman untuk keamanan nasional AS. Kartel Meksiko mempunyai pengaruh yang besar bagi peredaran narkoba di Amerika Serikat karena mereka dapat menjalankan perdagangan narkoba melalui sistem transportasi yang canggih, yang memungkinkan mereka mengirimkan narkoba hampir ke seluruh negara. Meksiko dapat memproduksi antara 10.000 dan 15.000 ton ganja setiap tahun, dan jumlah ini sampai pada 15.800 ton pada tahun 2007. Hal ini menyebabkan Meksiko mengirimkan ganja ke banyak negara, terutama Amerika Serikat (Saraswita dkk., t.t.).

Kontrol kartel narkoba sebagai kejahatan internasional terorganisir adalah rintangan yang menantang yang membutuhkan pandangan yang menyeluruh dan kolaborasi internasional. Pemerintah Meksiko telah berusaha keras untuk memerangi kartel narkoba, tetapi masih ada beberapa rintangan yang perlu diselesaikan. Tentang ini, Meksiko harus menguatkan keamanan sistemnya, memerangi korupsi, serta mengaitkan masyarakatnya sebagai berperan seraya memerangi serta menangani kartel narkoba (Idris dan Togatorop 2023).

Meskipun hubungan Trump dan Enrique Peña Nieto tidak selalu baik, AS dan Meksiko terus bekerja sama dalam memerangi perdagangan narkoba, termasuk kerja sama lembaga penegak hukum dan intelijen. Administrasi Trump

juga menekankan betapa pentingnya memerangi kartel narkoba Meksiko, yang merupakan penyuplai utama narkoba ke Amerika Serikat.

Amerika Serikat menghadapi situasi darurat fentanil. Efek penghilang rasa nyeri dari jenis opioid ini tiga puluh sampai lima puluh kali lebih besar daripada heroin. Oleh karena itu, bahkan dosis yang jauh lebih rendah memiliki efek yang sangat mematikan. Menurut laporan yang dirilis di laman resmi DEA, yang mengutip laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), terdapat 107.375 kematian akibat keracunan narkoba dan overdosis narkoba selama periode dua belas bulan, yang berlangsung dari awal tahun 2021 hingga Januari 2022 (Media 2023).

Distribusi narkoba di Meksiko dan hubungannya dengan AS menunjukkan kompleksitas masalah yang tidak hanya bersifat domestik tetapi juga transnasional. Penelitian tentang masalah ini diperlukan karena dinamika kebijakan dalam negeri, peran aktor negara maupun non-negara, dan kerja sama bilateral antara AS dan Meksiko. Oleh karena itu, melakukan penelitian tentang kebijakan Amerika Serikat terhadap peredaran narkoba di Meksiko selama pemerintahan Donald Trump sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri AS dijalankan dan sejauh mana efektif dalam menangani ancaman narkoba lintas negara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pemerintah Era Presiden Donald Trump tahun 2017-2021 menerapkan kebijakan Amerika Serikat terhadap peredaran narkoba dari Meksiko?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis kebijakan peredaran narkoba Amerika Serikat di Meksiko selama pemerintahan Presiden Donald Trump (2017-2021). Studi ini akan melihat bagaimana pemerintahan Trump memerangi peredaran narkoba di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat.

1. Fokus akan diberikan pada kebijakan penegakan hukum dan hubungan bilateral, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi ekonomi, peredaran narkoba, dan hubungan kedua negara.
2. Melihat kerja sama antara AS dan Meksiko dalam memerangi peredaran narkoba, termasuk kesuksesan serta kegagalan.
3. Melihat bagaimana kebijakan luar negeri Trump terhadap Meksiko berdampak pada upaya penanggulangan peredaran narkoba.

1.4 Cakupan Penelitian

Kebijakan narkoba mengalami perubahan besar selama pemerintahan Donald Trump studi ini memilih untuk mencakup tahun 2017–2021. Tahun-tahun ini termasuk pergeseran dalam strategi keamanan perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko dan peningkatan upaya penanggulangan narkoba. Periode ini mencakup masa jabatan Presiden Donald Trump, yang berlangsung dari Januari 2017 hingga Januari 2021. Periode ini juga ditandai dengan retorika keras terhadap Meksiko, baik dalam hal imigrasi maupun perdagangan narkoba, yang menunjukkan pergeseran dari pendekatan multilateral ke arah kebijakan proteksionis yang unilateral.

Selain itu tahun 2017-2021 overdosis semakin meningkat di Amerika Serikat, terutama yang disebabkan oleh fentanil dan opioid lainnya, yang sebagian besar berasal dari Meksiko. Ini membuat masalah ini sangat penting dan mempengaruhi masyarakat Amerika. Pada 2019 juga menjadi rekor tertinggi dalam kasus kematian akibat overdosis yaitu sekitar 72.000 orang. Kebijakan narkoba dalam konteks ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang unsur-unsur yang mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal yang berjudul "*The United States, Mexico, and the War on Drugs in the Trump Administration*" karya James M. Cooper mengevaluasi kebijakan dan taktik pemerintahan Donald Trump dalam perang melawan narkoba yang melibatkan AS dan Meksiko. Salah satu upaya utama pemerintahan Trump untuk memerangi perdagangan narkoba adalah menciptakan tembok di perbatasan, meningkatkan jumlah petugas patroli, dan penerapan teknologi canggih untuk mendeteksi narkoba. Meskipun ada ketegangan dalam hubungan diplomatik, Trump juga menekankan pentingnya kerjasama dengan pemerintah Meksiko (Cooper, t.t.).

Jurnal kedua yang berjudul *Implementasi Kerjasama Merida Initiative dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Ilegal antara Amerika dan Meksiko (2008-2019)* karya Muhammad Aji Permana dan Muhammad Arsy Ash Shiddidy menunjukkan bahwa inisiatif Merida dan kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan Meksiko telah menguntungkan penegakan hukum, koordinasi keamanan, dan pengurangan kekerasan narkoba. Namun, pencapaian ini masih

terbatas oleh sejumlah masalah struktural, termasuk ketergantungan dana, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemajuan teknologi kartel narkoba yang semakin canggih. Reformasi internal, peningkatan teknologi, dan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Strategi-strategi ini harus mampu menangani perubahan dinamis dalam perang melawan narkoba dan kejahatan terorganisir di wilayah tersebut (Permana dan Shiddidy 2025)

Tony Payan dalam bukunya yang ditulis dalam judul "*The Three U.S.-Mexico Border Wars: Drugs, Immigration, and Homeland Security*" membahas permintaan tinggi dari Amerika Serikat yang menyebabkan perdagangan narkotika telah menghasilkan pasar gelap yang kuat dan kekerasan di Meksiko. Selain menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat, kartel narkoba terlibat dalam berbagai tindakan kriminal yang menimbulkan ketidakstabilan di kedua negara tersebut. Payan menggambarkan peningkatan perhatian pada keamanan perbatasan, karena AS berusaha mencegah teroris memasuki negara melalui perbatasan Meksiko. Ini menyebabkan kontrol perbatasan lebih ketat dan lebih banyak pengawasan, yang sering memengaruhi hubungan perdagangan dan sosial antara kedua negara. Payan menyatakan bahwa AS sering menggunakan pendekatan sepihak dan mengabaikan bahwa mereka perlu bekerja sama bilateral yang lebih dalam dengan Meksiko untuk menangani masalah ini secara efektif (Payan 2006).

Dari jurnal pertama membahas perang melawan narkoba, meskipun menghabiskan banyak uang dan melibatkan banyak upaya penegakan hukum, sebagian besar tidak berhasil mengurangi penggunaan narkoba di Amerika Serikat. Sebaliknya, ini menyebabkan lebih banyak kekerasan dan ketidakstabilan

di Meksiko, membuat negara itu lebih lemah, dan membuat hubungan AS-Meksiko lebih buruk. Pemerintahan Trump melakukan banyak upaya untuk menghentikan organisasi perdagangan narkoba yang terus berkembang, yang mengancam stabilitas wilayah. Jurnal kedua membahas Implementasi *Merida Initiative* oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko serta membahas hambatan dan tantangan dalam implementasi *Merida Initiative*. Jurnal ini juga membahas dampak positif dari implementasi tersebut.

Sedangkan bagian ketiga dari tinjauan pustaka ini dari buku karya Tony Payan berbicara tentang tiga masalah utama yang mempengaruhi hubungan AS-Meksiko yaitu narkoba, imigrasi, dan keamanan nasional. Payan berpendapat bahwa keamanan telah diprioritaskan atas kesejahteraan ekonomi perbatasan karena kebijakan keamanan AS selama hampir dua puluh tahun. Kondisi ini memperburuk hubungan antara kedua negara, menumbuhkan perasaan anti-Amerika di Meksiko, dan berpotensi mendorong kembalinya sistem otoriter di negara tersebut. Dari ketiga penelitian ini belum membahas tentang bagaimana Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan Amerika Serikat terhadap peredaran narkoba dari Meksiko pada tahun 2017-2021. Maka dari itu penulis akan membahas dalam penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle digunakan dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa dua faktor utama mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Grindle 2017). Merilee S. Grindle, dalam bukunya *"Politics and Policy*

Implementation in the Third World" mengatakan bahwa dinamika politik dan kekuasaan mempengaruhi implementasi kebijakan di negara-negara berkembang. Grindle mengatakan bahwa setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program tindakan telah dirancang dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan, maka proses implementasi umum dapat dimulai. Ketiga hal tersebut merupakan syarat-syarat dasar pelaksanaan implementasi kebijakan publik untuk mengukur keberhasilan. Konsep dasar adalah bahwa implementasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan diubah. Tingkat implementasi kebijakan menentukan tingkat keberhasilan.

1. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan masyarakat, tergantung pada seberapa banyak kepentingan kelompok sasaran atau target group yang tercakup dalam kebijakan tersebut. Berbagai kepentingan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Berusaha untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa kebijakan harus memiliki beberapa jenis keuntungan yang menunjukkan manfaat yang akan dihasilkan dari penerapan kebijakan.

c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Seberapa besar perubahan yang diharapkan dari adanya kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan.

d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Karena pengambilan keputusan adalah bagian penting dari pelaksanaan kebijakan, perlu dijelaskan di mana pengambilan keputusan untuk kebijakan yang akan dilaksanakan. Apakah lokasi program sudah tepat.

e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Pelaksana kebijakan yang kompeten diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Apakah sebuah kebijakan menyebutkan implementornya dengan rinci, ini sudah harus terlihat atau terdata dengan baik.

f. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah program memiliki sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan juga harus memiliki sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Implementation* (Lingkungan Implementasi)

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan, kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat. Jika hal ini tidak dipertimbangkan dengan baik, kemungkinan program yang akan dilaksanakan tidak akan membawa hasil yang diharapkan.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Sedang Berkuasa)

Kesuksesan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungannya, lembaga yang akan mempengaruhi kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dianggap penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respons dari para pelaksana; dalam poin ini.

3. *Outcomes:*

- a. *Impact on Society, Individuals, and Groups* (Dampak pada Masyarakat, Individu, dan Kelompok)

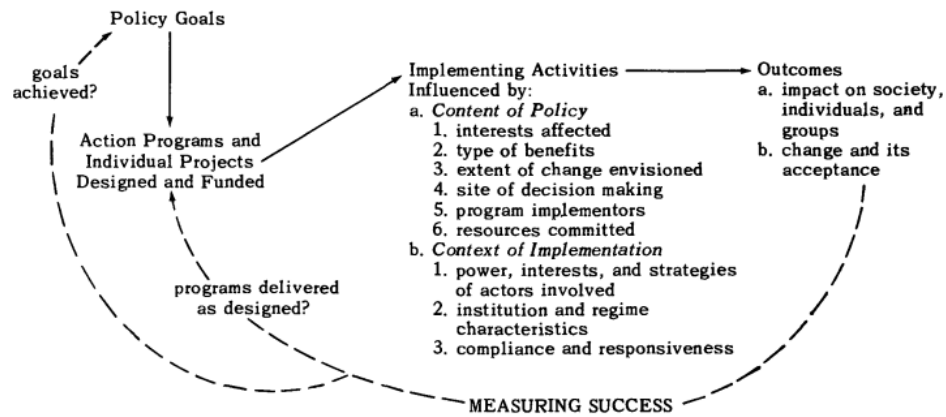
Setiap kebijakan memiliki kelompok sasaran yang terpengaruh, dan cara kelompok sasaran tersebut merasakan dampak kebijakan yang menunjukkan seberapa baik implementasinya berhasil.

- b. *Change and its Acceptance* (Perubahan dan Penerimaannya)

Kelompok sasaran juga harus menerima perubahan yang disebabkan oleh kebijakan.

Gambar 1. Grafik Konsep Teori Implementasi Kebijakan Publik Oleh Merilee S. Grindle

Figure 1-1. Implementation as a Political and Administrative Process



Sumber: Merilee S. Grindle *"Politics and Policy Implementation in the Third World"*

1.7 Argumen Sementara

Ada sejumlah metode yang digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang menangani peredaran narkoba dari Meksiko. Selain itu, dia bekerja sama dengan pemerintah Meksiko lebih banyak dalam hal intelijen, pertukaran informasi, dan pelatihan untuk memerangi sindikat narkoba. Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik, serta kerangka pemikiran dari buku karya Merilee S. Grindle yang berjudul *"Politics and Policy Implementation in the Third World"*, Grindle menjelaskan dua konsep dan *outcomes*.

Pertama *context of policy* yaitu isi kebijakan yang berisi *interest affected* yaitu kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan masyarakat, *type of benefits* yaitu keuntungan yang dihasilkan dari penerapan kebijakan, *extent of change*

envision merupakan seberapa besar perubahan yang ingin dicapai, *site of decision making* yaitu menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan tersebut, program implementer yaitu melihat apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah terdata dengan baik atau belum, *resources committed* merupakan sumber daya yang mendukung agar kebijakan berjalan dengan baik.

Yang kedua *context of implementation* yaitu *power, interest and strategy* ini menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, *institution and regime characteristic* yaitu sukses atau tidaknya sebuah kebijakan tergantung dari lingkungannya, *compliance and responsiveness* yaitu respon masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang dibuat. Yang ketiga yakni *outcomes* dari dua implementasi diatas yaitu *impact on society, individuals and groups* yaitu menjelaskan dampak dari kebijakan tersebut baik dalam masyarakat, lingkungan maupun kelompok, yang terakhir *change and its acceptance* yaitu sasaran penerima perubahan karena adanya kebijakan yang dibuat (Grindle 2017).

Banyak pihak berpartisipasi dalam kebijakan narkoba, seperti pemerintah Amerika Serikat dan lembaga penegak hukum. Pemerintah Amerika Serikat berusaha mengurangi pasokan narkoba, pemerintah Meksiko harus menyeimbangkan penegakan hukum dan penanganan kekerasan yang terkait dengan kartel.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data akan dilakukan, dan kemudian data tersebut akan diolah untuk menghasilkan sajian deskriptif yang terdiri dari kalimat dan frasa.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu Pemerintah Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump dan objek penelitian ini adalah kebijakan Amerika Serikat terhadap peredaran narkoba di Meksiko pada Era Presiden Donald Trump tahun 2017-2021.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan buku, jurnal, website yang terpercaya, analisis dokumen resmi pemerintah AS, dan artikel berita yang berkaitan dengan subjek penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis akan memeriksa dan memahami secara menyeluruh data sekunder yang ditemukan di buku, bab, jurnal, dan artikel terkait penelitian dengan menggunakan sumber daya online seperti Google Scholar dan website yang menyediakan literatur. Mereka juga akan memeriksa e-book dan situs web resmi pemerintahan AS untuk memastikan bahwa data tersebut benar. Penulis menyusun laporan penelitian berdasarkan kesimpulan dan saran ini untuk didistribusikan ke masyarakat ilmiah dan pemangku kepentingan terkait.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas pengetahuan tentang masalah narkoba di Meksiko dan bagaimana hal itu berdampak pada Amerika Serikat, ringkasan kebijakan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah ini. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berpusat pada kebijakan Amerika Serikat terhadap Peredaran Narkotika di Meksiko pada Era Presiden Donald Trump (2017-2021). Kebijakan yang diambil pemerintah AS selama pemerintahan Donald Trump untuk memerangi peredaran narkoba dari Meksiko.

Bab ketiga analisis implementasi kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap peredaran narkoba di Meksiko menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Merilee S. Grindle, dalam bukunya *"Politics and Policy Implementation in the Third World"*.

Bab keempat membuat kesimpulan hasil analisis dan evaluasi kebijakan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

BAB 2
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PEREDARAN
NARKOTIKA

2.1 Hubungan Amerika Serikat dan Meksiko dalam Menghentikan Penyebaran Narkotika

Tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat adalah "pasar" narkotika terbesar di dunia. Ini ditunjukkan oleh data yang dikumpulkan oleh *National Center for Drug Abuse Statistics (NCDAS)*. Data ini menunjukkan bahwa 31,9 juta warga AS yang berusia 12 tahun ke atas menggunakan narkoba. Pada 2020 merupakan tingkat tahun terbesar kematian akibat overdosis yang sangat meningkat sebesar 31,0% (National Center for Drug Abuse Statistics 2022).

Data sementara dari Pusat Statistik Kesehatan Nasional CDC menunjukkan bahwa, selama periode dua belas bulan yang berakhir pada April 2021 ada sekitar 100.306 kematian akibat overdosis obat di Amerika Serikat. Ini adalah peningkatan 28,5% dari 78.056 kematian yang terjadi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Data baru menunjukkan peningkatan perkiraan kematian akibat overdosis opioid menjadi 75.673 dalam periode 12 bulan yang berakhir pada April 2021, dari 56.064 pada tahun sebelumnya. Kematian akibat overdosis opioid sintetis (terutama fentanil) dan psikostimulan (termasuk metamfetamin) juga meningkat. Kematian akibat opioid alami dan semi-sintetis (seperti obat pereda nyeri resep) dan kokain juga meningkat (National center for health statistic 2021).

Dengan munculnya fraksi-fraksi dalam kelompok DTO yang sama, kegiatan DTO berkembang secara pesat. Namun, keberhasilan ekstradisi terhadap gembong narkoba terkenal seperti El Chapo tidak menjamin bahwa itu akan menyelesaikan konflik narkoba di Amerika Serikat (Putri dan Ariana 2022). Fokus kerja sama antara Meksiko dan Amerika Serikat adalah untuk menghentikan penyebaran narkoba di Meksiko yang dilakukan oleh kartel narkoba, kelompok pengedar narkoba ilegal yang terorganisir. Kerjasama antara pemerintahan Meksiko dan pemerintahan Amerika Serikat ini bermula pada peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 11 September.

Salah satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September adalah serangan teroris yang melibatkan pembajakan empat pesawat komersial maskapai AS, *American Airlines* dan *United Airlines*, yang berencana terbang menuju wilayah pantai barat Amerika Serikat. Pembajakan pesawat tersebut menghancurkan dua menara *World Trade Centre (WTC)* dan menewaskan setidaknya 2.753 orang, hal ini merupakan serangan teroris terbesar yang pernah terjadi di Amerika Serikat (*CNN Indonesia* 2019).

Kedua negara telah membentuk tim gabungan investigasi narkoba untuk memerangi perdagangan narkoba. Selain itu, kedua negara telah meningkatkan komunikasi informasi dan intelijen untuk membantu menemukan dan memerangi kartel narkoba (Idris dan Togatorop 2023). Ketergantungan masyarakat Amerika Serikat pada narkoba terutama dari kartel narkoba Meksiko, Amerika Serikat telah menjadi pasar yang ideal untuk perdagangan narkoba. Jumlah kejahatan di Meksiko telah meningkat sebagai akibat dari perubahan ekonomi yang terjadi, yang

berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi dan kesulitan mencari pekerjaan.

Meningkatnya korupsi, kekerasan, dan kejahatan di Meksiko bersama dengan runtuhnya sistem peradilan pidana telah diperburuk oleh struktur politik satu partai yang memungkinkan organisasi perdagangan narkoba untuk membangun jaringan korupsi, mereka memastikan hak distribusi dan akses pasar melalui perlindungan yang disetujui pemerintah yang berfungsi sebagai penyuaipan (Saragih dkk. 2021).

2.1.1 Merida Initiative

Pada pemerintahan Presiden Donald Trump, instrumen koersif dan intervensi banyak digunakan dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Hal ini terlihat dalam tindakan Trump yang menekankan penegakan hukuman bagi para imigran ilegal; instrumen intervensi ini tercermin dalam pembangunan tembok perbatasan Meksiko-AS, yang dapat dianggap sebagai bentuk intervensi politik dengan tujuan stabilisasi (Ningrum 2023).

Pemimpin kedua negara sering berbicara di tingkat tinggi untuk membahas strategi lanjutan untuk mengatasi masalah perdagangan narkoba. Misalnya, Presiden Trump dan Presiden Meksiko dapat bertemu untuk membahas cara meningkatkan kerja sama bilateral dan penegakan hukum dalam memerangi kartel narkoba. Presiden Trump juga sering mengulangi komitmennya untuk menghentikan aliran ilegal uang, senjata, narkoba, dan manusia melalui perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, serta untuk mengakhiri kartel narkoba (Muslimin dkk. 2024).

Amerika Serikat dan Meksiko membentuk kerja sama bilateral yang dikenal sebagai *Merida Initiative* sebagai tanggapan atas ancaman narkoba lintas negara. Karena ancaman ini merupakan ancaman lintas negara, negara-negara tersebut harus bekerja sama untuk memerangi masalah yang mengancam keamanan individu warga negara mereka dan mengancam aspek keamanan negara seperti politik, ekonomi, sosial, dan militer.

Kerja sama dapat berupa transfer ilmu pengetahuan, pemberian dana, dan melakukan penegakkan hukum karena lembaga penegak hukum yang bertindak secara mandiri tidak dapat menyelesaikan masalah karena wewenang yang diberikan kepada mereka terbatas dalam menghentikan tindakan kriminal tertentu. Mengingat bahwa perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko berjarak 1.341 kilometer, itu sulit untuk dicapai. Amerika Serikat harus menangani krisis narkoba ini karena banyaknya permintaan narkoba di Amerika Serikat yang mengarah pada munculnya kartel narkoba di Meksiko (Jelita dkk. 2020).

Amerika Serikat memberikan dana sebesar 146 juta dolar kepada Meksiko untuk memperbaiki kepolisian mereka dengan memberikan pelatihan. Melalui peningkatan infrastruktur untuk akademi polisi negara bagian dan federal, peningkatan keterampilan kepolisian, dan peningkatan investigasi dan pengawasan, *Merida Initiatives* membantu Meksiko mencapai akreditasi internasional pada seluruh sistem penjara negara tersebut (Idris dan Togatorop 2023).

Merida Initiative memanfaatkan kebijakan AS untuk memberikan bantuan dana senilai 1,6 miliar dolar kepada Meksiko. Dengan bantuan dana ini Meksiko berharap dapat membeli peralatan dan transportasi yang mendukung penegakan hukum, seperti kapal dan pesawat. Mereka juga akan memberikan dana untuk

pelatihan penegakan hukum dan lembaga keadilan, serta untuk program pencegahan sumber tindakan kriminal yang terkait dengan perdagangan narkoba ilegal. Presiden Bush memulai kebijakan Amerika Serikat melalui *Merida Initiative*, yang dilanjutkan oleh Presiden Obama pada tahun 2009. Bantuan keuangan kepada Meksiko tetap menjadi kebijakan presiden sebelumnya. Namun, selama pemerintahan Obama, bantuan dana ini difokuskan pada penegakan hukum untuk memerangi kartel narkoba.

Amerika Serikat melakukan banyak hal untuk memerangi kartel narkoba melalui kebijakannya. Dari tahun 2006 hingga 2010, penyitaan narkoba meningkat. Selain itu, para pemimpin kartel narkoba telah ditangkap. Mulai sejak itu, berkat dukungan dana, menjadi pusat aktivitas ilegal diberikan kepada Meksiko oleh Amerika Serikat untuk meningkatkan penegakan hukum dan mengembangkan infrastruktur penegak hukum yang lebih kuat dan lebih baik (Nusa Bangsa, t.t.).

Merida Initiative memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- Melemahkan organisasi kriminal.

Pilar ini berusaha untuk melemahkan kartel narkoba dan kelompok kriminal lainnya melalui penegakan hukum yang lebih baik. Penangkapan pemimpin kartel, penyitaan narkoba, dan aset kriminal adalah contohnya. Amerika Serikat telah mengalokasikan miliaran dolar untuk mendukung operasi ini, termasuk memberikan pelatihan bagi penegak hukum Meksiko (Arnanda 2024).

- Meningkatkan kontrol perbatasan.

Perbatasan abad ke-21 dibuat untuk memungkinkan perdagangan legal antara barang dan orang. Sistem keamanan modern yang ketat mencegah penyelundupan narkoba, senjata, manusia, dan uang tunai dalam jumlah besar.

Untuk membuat batas abad ke-21, *Merida Initiative* telah mengalokasikan sejumlah besar dana untuk akan digunakan untuk membantu infrastruktur dan teknologi terutama di jalur dan perbatasan yang menghubungkan Meksiko dan Amerika Serikat, seperti bandara, terminal, dan pelabuhan. Melalui *Merida Initiative*, penjaga keamanan yang juga dilengkapi dengan peralatan *non-intrusive* akan dilatih untuk mendeteksi aktivitas kriminal (Samosir 2014).

- Meningkatkan sistem peradilan.

Tujuan pilar ketiga adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas sistem peradilan dan penegakan hukum Meksiko. Ini mencakup reformasi peradilan, pelatihan jaksa dan hakim, dan penguatan sistem akuntabilitas untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik (Agusti 2019).

- Mengurangi permintaan narkoba ilegal di Amerika Serikat.

Untuk menghancurkan kartel narkoba di Meksiko, *Merida Initiative* menggunakan metode sistematis. Salah satu contohnya adalah penangkapan dan pengadilan terhadap para pemimpin kartel, penurunan keuntungan dari perdagangan narkoba, penghentian praktik pencucian uang, dan penurunan jumlah produksi narkoba, khususnya di Meksiko. Peralatan, teknologi, dan pelatihan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, *Mérida Initiative* merancang inisiatif untuk mendukung penyelidikan yang lebih baik, penuntutan yang lebih maksimal, peningkatan penangkapan, dan berbagai upaya pencegahan lainnya (Samosir 2014).

Pemerintahan Trump mungkin akan melemahkan aspek-aspek positif dari inisiatif tersebut dan memperburuk aspek-aspek yang lemahnya. Misalnya, kerja sama antara kedua negara kemungkinan akan berkurang dalam hal pencairan

hubungan bilateral. Mereka yang tinggal di Meksiko mungkin menganggap retorika Trump menyinggung dan kembali menggambarkan kerja sama dengan penegak hukum AS sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara mereka (Tibben 2017).

Pada masa Presiden Donald Trump pendekatan yang lebih agresif dan penekanan pada keamanan perbatasan menandai kebijakan penegakan hukum dan pengamanan narkotika dari Meksiko ke Amerika Serikat. *Merida Initiative* yang dimulai pada tahun 2007, masih merupakan kerangka kerja utama untuk kerja sama antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam memerangi narkoba. Pada era Trump, fokus inisiatif ini adalah peningkatan anggaran untuk Meksiko dan dukungan militer untuk memerangi kartel narkoba (Saraswita dkk., t.t.).

2.2 Kebijakan Amerika Serikat terhadap Narkotika Era Presiden Donald Trump

Amerika Serikat telah lama dianggap sebagai salah satu pusat narkotika terbesar di dunia. Amerika Serikat menghadapi berbagai masalah terkait narkoba, termasuk ancaman opioid yang telah mewabah dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk meredam, ancaman *metamfetamin* yang terus menerus, ancaman kembali meningkatnya kokain, masalah zat psikoaktif baru (*new psychoactive substances* (NPS) yang juga menjadi masalah, dan masalah ganja domestik yang semakin meningkat (Taufik 2019).

Presiden Donald Trump menjalankan politik luar negerinya sebagai tujuan keamanan nasional Amerika Serikat, menggunakan kampanye "*Make America Great Again*" selama kampanye Trump memainkan peran penting dalam melindungi kebijakan keamanan negaranya dari ancaman luar. Sebagai presiden,

Trump memiliki tanggung jawab untuk mengambil setiap tindakan yang mungkin terjadi dan berhak untuk menjaga kepentingan negara.

Presiden Amerika Serikat melakukan analisis, diagnosis, dan penelitian dalam konteks politik luar negeri terhadap lingkup eksternal untuk menjaga kepentingan internal. Prioritas utama pemerintah Amerika Serikat adalah keselamatan, kepentingan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Dengan membangun kembali militer, mempertahankan perbatasan, serta melindungi kedaulatan, Amerika Serikat menghadapi dunia yang sangat berbahaya dan penuh dengan berbagai ancaman yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Hartanto dkk. 2022).

Dalam hal peredaran narkoba dari Meksiko, kebijakan Trump berfokus pada penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk pengetatan kontrol perbatasan dan upaya untuk mencegah pasokan narkoba seperti fentanyl ke Amerika Serikat. Salah satu langkah penting yang diambil adalah ancaman terhadap Meksiko dengan tindakan militer jika negara tersebut tidak dapat memerangi kartel narkoba yang beroperasi di wilayahnya.

Selain itu, Trump mendorong peningkatan kerjasama keamanan dengan Meksiko, tetapi seringkali dengan pendekatan yang lebih keras dan tidak memperhitungkan perubahan sosial-ekonomi negara itu. Kebijakan-kebijakan ini seringkali berfokus pada "penanggulangan kriminalitas" tanpa memperhatikan masalah fundamental seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ketidakstabilan politik di Meksiko yang mendukung pertumbuhan kartel narkoba (Beittel 2019).

2.2.1 Executive Order 13784

Setelah Presiden Donald Trump menerbitkan sejumlah perintah eksekutif yang menyasar sejumlah firma hukum besar di Amerika Serikat, dunia hukum tengah menghadapi gelombang ketegangan baru. Langkah ini dianggap sebagai pembalasan terhadap perusahaan yang sebelumnya pernah berurusan dengan kasus hukum atau mendukung upaya politik yang bertentangan dengan Trump (Jayanti 2025).

Untuk mengatasi krisis, pemerintah telah mengambil tindakan tertentu. Presiden mengeluarkan *Executive Order 13784* pada Maret 2017, yang membentuk komisi untuk menilai luasnya dan keberhasilan tanggapan federal terhadap kecanduan narkoba dan krisis opioid. Pada November 2017, Komisi Presiden tentang Memerangi Kecanduan dan Krisis Opioid mengeluarkan laporan akhir yang mencantumkan beberapa saran untuk meningkatkan tanggapan pemerintah federal terhadap masalah opioid.

Pada 26 Oktober 2017, Presiden juga meminta *The Department of Health and Human Services (HHS)* untuk melaporkan permintaan obat dan krisis opioid telah berkembang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak (Goodwin 2018). Lebih dari 50.000 orang meninggal karena krisis kesehatan masyarakat ini, sebagian besar karena opioid, dan telah menyebabkan keluarga dan masyarakat di seluruh Amerika merasa sakit, menderita, dan kehilangan uang.

Misi komisi adalah mempelajari cakupan dan efektivitas respons Federal terhadap kecanduan narkoba serta krisis opioid sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 perintah ini, sekaligus memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk meningkatkan respons tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, komisi bertanggung

jawab untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pendanaan Federal yang ada dalam memerangi kecanduan narkoba dan krisis opioid, menilai ketersediaan serta aksesibilitas layanan perawatan kecanduan dan pemulihan overdosis di seluruh negeri, serta mengidentifikasi wilayah yang masih kurang terlayani.

Selain itu, komisi juga ditugaskan untuk melaporkan praktik terbaik dalam pencegahan kecanduan, termasuk melalui pendidikan bagi penyedia layanan kesehatan, evaluasi praktik resep, serta penggunaan dan efektivitas program pemantauan obat resep di tingkat negara bagian. Komisi Presiden untuk mencegah kecanduan narkoba dan krisis opioid telah dibentuk (The American Presidency Project 2017).

Kebijakan ini mencerminkan sikap Trump terhadap narkoba. Pada masa Presiden Donald Trump, pendekatan yang lebih agresif dan tegas digunakan dalam penegakan hukum dan pengamanan perbatasan terkait narkoba antara AS dan Meksiko. Keinginan Trump untuk melakukan tindakan lebih agresif terhadap kartel, juga menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran kedaulatan Meksiko (Berlianto 2021). Di tengah meningkatnya kasus overdosis fentanil, kedua negara setuju untuk bekerja sama untuk membongkar laboratorium yang memproduksi obat terlarang. Pejabat AS menekankan pentingnya memerangi masalah ini secara kolektif selama pertemuan tingkat tinggi (AFP 2023).

Peningkatan penggunaan obat-obatan terlarang telah mengurangi produktivitas masyarakat Amerika Serikat serta membebani sistem kesehatan masyarakat negara. Perdagangan narkoba juga dapat menyebabkan korupsi, pengabaian pemerintah, ancaman kestabilan negara-negara tetangga Amerika Serikat dan dana untuk tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh kelompok

kriminal yang luas di dalam dan luar negeri. Paparan terhadap fentanil, heroin, kokain, dan metamfetamin, yang telah membunuh jutaan orang Amerika setiap tahun. Kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh berbagai DTO besar dan produsen dari luar AS menimbulkan ancaman kesehatan dan keamanan bagi masyarakat Amerika (Taufik 2019).

2.2.2 Jalur Masuknya Narkotika dari Meksiko ke Amerika Serikat

Perbatasan barat daya California dan bagian selatan Texas merupakan pintu masuk utama narkotika ke Amerika Serikat. Karena Brownsville, McAllen, Laredo, dan El Paso menjadi salah satu rute transportasi ilegal yang digunakan untuk masuk ke Amerika Serikat dari Amerika Tengah melalui Meksiko, daerah di perbatasan antara Texas dan Meksiko merupakan lokasi strategis bagi kartel narkotika. menjadikannya lebih mudah bagi kartel narkoba untuk masuk ke Amerika Serikat (Lamas 2016).

Narkotika masuk ke Amerika Serikat melalui wilayah pesisir Meksiko. Misalnya, narkotika dari Samudra Pasifik masuk melalui wilayah barat daya Meksiko dan dari perairan teluk Meksiko masuk melalui wilayah Timur Meksiko. Kartel Meksiko juga menyebarkan narkoba di beberapa lokasi di empat negara bagian AS: California, Arizona, New Meksiko, dan Texas (McCAUL, t.t.).

Gambar 2. Jalur Narkotika dari Meksiko ke Amerika Serikat



Sumber: <http://www.stratfor.com>

BAB 3

ANALISIS *CONTENT OF POLICY* DAN *CONTEXT OF IMPLEMENTATION* DAN *OUTCOMES* PEREDARAN NARKOTIKA AMERIKA SERIKAT DARI MEKSIKO

3.1 *Policy Goals* (Tujuan Kebijakan)

Tujuan kebijakan, seperti yang dinyatakan oleh Merilee S. Grindle adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan dan berfungsi sebagai pedoman penting dalam proses implementasi kebijakan. Sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif sangat bergantung pada seberapa jelas dan konsisten tujuan mereka. Pelaksana kebijakan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengimplementasikan tujuan yang lebih jelas ke dalam program konkret, sedangkan tujuan yang terlalu luas atau tidak jelas akan menyulitkan implementasi (Grindle 2017).

Untuk mencapai tujuan ini, Komisi Presiden untuk memerangi kecanduan dan krisis opioid dibentuk, lembaga penegak hukum seperti DEA ditingkatkan dan bekerja sama lebih erat dengan Meksiko untuk menghentikan peredaran narkoba lintas batas. Memerangi penyalahgunaan, kecanduan, dan overdosis narkoba, termasuk krisis opioid adalah tujuan dari kebijakan *Executive Order 13784* (The American Presidency Project 2017). Dalam teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, tujuan kebijakan merupakan representasi utama dari arah dan tujuan kebijakan publik.

3.2 Content of Policy (Isi Kebijakan)

Kerja sama antara Meksiko dan Amerika Serikat, serta upaya untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat, beberapa kunci penting untuk mengatasi kejahatan transnasional ini. Memperkuat kerja sama internasional dapat membantu mengurangi perdagangan narkoba internasional. Untuk menangani kartel narkoba sebagai tindakan terorisme internasional, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, juga diperlukan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat (Idris dan Togatorop 2023).

3.2.1 Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Peredaran narkoba dari Meksiko pada tahun 2017–2021 mempengaruhi keamanan, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan stabilitas sosial di Amerika Serikat. Berikut beberapa faktornya:

1. Kepentingan Keamanan Nasional

Sebagian besar orang percaya bahwa peredaran narkoba dari Meksiko, terutama yang dilakukan oleh kartel seperti Sinaloa dan CJNG, merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS. Kekerasan yang terkait dengan perdagangan narkoba, seperti penembakan, kejahatan geng, dan penyelundupan lintas batas, membuat masyarakat merasa tidak aman. Akibatnya, masyarakat mendukung kebijakan yang memperkuat perbatasan, seperti membangun tembok perbatasan dan meningkatkan pengawasan di wilayah selatan Amerika Serikat (Felbab 2017).

2. Kesehatan Masyarakat

Masuknya narkotika seperti fentanyl dan heroin dari Meksiko sangat mempengaruhi krisis opioid di Amerika Serikat, yang menyebabkan kecanduan, overdosis, dan kematian dalam banyak masyarakat. Krisis narkoba yang mematikan di Amerika Serikat dipicu oleh opioid, termasuk fentanil, heroin, dan opioid sintetis yang sedang berkembang. Sangat tragis, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) memperkirakan lebih dari 105.000 kematian di Amerika Serikat karena overdosis narkoba dalam 12 bulan yang berakhir pada Oktober 2021. Di Amerika Serikat, overdosis opioid sintetis, khususnya fentanil yang dibuat secara ilegal, adalah penyebab utama kematian (United States Department of State, t.t.).

3. Kepentingan Ekonomi

Penyalahgunaan narkoba berdampak pada ekonomi masyarakat juga, terutama dalam bentuk penurunan produktivitas kerja, biaya kesehatan, dan pengeluaran publik untuk rehabilitasi dan penegakan hukum. Karena prevalensi narkoba yang tinggi, negara bagian seperti West Virginia, Ohio, dan Pennsylvania mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan (Healthcare 2017).

4. Kepentingan Sosial dan Keluarga

Struktur sosial masyarakat dipengaruhi secara langsung oleh peredaran narkotika. Banyak keluarga kehilangan anggota karena kecanduan atau penahanan; anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang traumatis; dan komunitas mengalami keretakan sosial. Oleh karena itu, masyarakat mendukung kebijakan preventif dan rehabilitatif daripada

represif. Seseorang mungkin merasakan efek positif obat saat pertama kali menggunakannya. Faktor lingkungan adalah faktor yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan tempat tinggal seseorang.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang adalah rumah dan keluarga, terutama lingkungan rumah, teman sebaya (Abuse 2023). Penggunaan dini menunjukkan bahwa semakin dini seseorang mulai menggunakan narkoba, semakin besar kemungkinan mereka mengalami masalah serius, meskipun penggunaan narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada usia berapa pun (Substance Abuse and Mental Health Services Administration. 2023). Metode penggunaan obat bisa menjadi kecanduan jika obat dihisap atau disuntikkan ke pembuluh darah. Obat-obatan, baik yang disuntikkan maupun yang dihisap, memasuki otak dalam hitungan detik dan menyebabkan efek yang kuat (Squeglia dkk. 2009).

3.2.2 *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Tidak menggunakan narkoba memberikan berbagai keuntungan signifikan bagi individu maupun negara, terutama di Amerika Serikat yang menghadapi krisis penyalahgunaan narkotika dalam skala besar. Kesehatan yang lebih baik dan risiko kematian yang lebih rendah menjadi dampak langsung dari gaya hidup bebas narkoba. Jumlah pecandu narkoba di Amerika Serikat memiliki banyak konsekuensi negatif bagi negara itu. Rata-rata 52.600 orang meninggal setiap tahun, dengan 14.200 diantaranya meninggal akibat overdosis kokain, serta munculnya penyakit kronis seperti HIV/AIDS akibat penggunaan alat untuk mengonsumsi narkoba secara bergantian (Sandiawan 2022).

Dengan menghindari risiko kriminalisasi dan hukuman penjara yang tidak efektif, mereka juga dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil dan produktif tanpa stigma sosial dan konsekuensi hukum yang berat (ICJR 2017). Tidak menggunakan narkoba juga berarti individu tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli narkoba ilegal. Lebih jauh, pengurangan permintaan narkoba akan menurunkan keuntungan pasar gelap, sehingga dapat menekan aktivitas kriminal yang merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan (Herdiana 2020). Hampir semua obat-obatan terlarang yang dikonsumsi di Amerika Serikat dibuat di luar negeri, dibawa ke negara ini melalui perbatasan darat, atau dikirim melalui jasa angkutan komersial dan pos.

Untuk mengatasi hal ini, dalam strategi pengendalian narkotika nasional berfokus pada mencegah produksi dan distribusi narkoba di dalam negeri. Menghentikan, membubarkan, dan menghapus sindikat perdagangan narkoba adalah bagian dari tindakan yang diambil. Hal ini dicapai melalui kerja sama erat dengan mitra internasional serta peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum domestik, termasuk program *High Intensity Drug Trafficking Areas* (HIDTA).

Selain itu, strategi ini menanggapi perubahan pola perdagangan narkoba yang terus berkembang, seperti penjualan narkoba melalui situs web gelap, dengan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah pengiriman melalui layanan pos dan ekspres. Upaya pencegahan juga diperkuat untuk mencegah narkoba masuk ke Amerika melalui perbatasan (Office of National Drug Control Policy, t.t.).

3.2.3 *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Pemerintahan Trump telah berjanji untuk mengurangi kematian akibat overdosis, salah satu krisis kesehatan masyarakat paling mematikan di Amerika Serikat, dengan menerapkan penegakan hukum, patroli perbatasan, dan tarif terhadap Tiongkok dan Meksiko untuk mencegah masuknya fentanil dan obat-obatan berbahaya lainnya. Namun, pemerintah juga mengupayakan pemangkasan besar-besaran terhadap program yang mengurangi permintaan obat (Hoffman 2025).

Perubahan yang ingin dicapai Trump dengan adanya kebijakan yang dibuat adalah mengurangi jumlah kematian yang disebabkan oleh overdosis narkoba. Administrasi akan memperluas akses ke pendidikan pencegahan overdosis dan obat pembalikan overdosis opioid yang menyelamatkan jiwa seperti nalokson untuk memerangi krisis narkoba dan epidemi opioid, yang sebagian besar didorong oleh fentanyl. Melalui kampanye kesehatan masyarakat dan pendidikan, Trump akan meningkatkan kesadaran tentang pencegahan overdosis. Selain itu Trump akan memastikan semua orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan perawatan medis darurat.

Untuk melindungi generasi Amerika di masa depan dari efek buruk kecanduan, sangat penting untuk mencegah penggunaan narkoba sebelum dimulai. Administrasi akan mendorong kampanye pendidikan dan program pencegahan berbasis bukti, terutama di komunitas dan sekolah. Tujuan dari Pencegahan Penggunaan Narkoba Sebelum Dimulai adalah untuk mengurangi penggunaan narkoba, terutama di kalangan remaja. Trump akan bekerja sama dengan organisasi

negara bagian dan lokal untuk meningkatkan ketahanan remaja dan mendorong perilaku sehat.

Dengan penekanan pada media sosial, Trump menggunakan semua jenis media untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang Amerika untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penggunaan obat-obatan terlarang dan cara menghindarinya. Dia juga mengajarkan mereka bagaimana mencegah overdosis dan menyelamatkan nyawa serta mendapatkan perawatan dan perawatan yang tepat.

Administrasi akan memastikan bahwa perawatan yang efisien, tepat waktu, dan berbasis bukti tersedia untuk setiap individu di Amerika Serikat yang membutuhkannya. Ini akan mencakup meningkatkan akses ke obat-obatan untuk gangguan penggunaan opioid serta meningkatkan integrasi perawatan kesehatan mental dengan layanan dukungan klinis dan pemulihan (The White House 2025).

3.2.4 Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Kebijakan tentang narkoba yaitu *executive order 13784* yang dibuat oleh Presiden Donald Trump di *White House* yaitu Istana Kepresidenan Amerika Serikat yang terletak di *Washington DC*, Amerika Serikat. Kebijakan Trump memberi jaksas federal lebih banyak kebebasan untuk menuntut pelanggaran ganja menurut hukum federal, meskipun ganja sudah dilegalkan di beberapa negara bagian seperti California, Colorado, dan Washington. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara nasional (Agency 2018).

Pada masa kepresidenan Trump menjanjikan tindakan keras di tingkat federal untuk mengatasi krisis opioid, termasuk hukuman yang lebih berat bagi

pelaku narkoba dan pengawasan di perbatasan AS yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah federal di tingkat nasional. Lebih dari seratus orang Amerika dibunuh setiap hari karena epidemi penggunaan obat opioid di Amerika Serikat (Hoke 2017).

3.2.5 Program Implementer (Pelaksana Program)

- a. *Drug Enforcement Administration (DEA)* memainkan peran penting dalam memerangi penyelundupan narkoba dari Meksiko ke Amerika Serikat selama pemerintahan Presiden Donald Trump (2017–2021). Pada 2017, laporan tahunan DEA menunjukkan bahwa kartel-kartel Meksiko, terutama Kartel Sinaloa dan Jalisco New Generation Cartel mendominasi pasar narkoba AS dengan menyelundupkan heroin, kokain, metamfetamin, ganja, dan fentanil melalui koridor perbatasan barat daya AS. DEA juga menemukan bahwa kartel-kartel ini berkembang ke berbagai wilayah di AS, termasuk New England. Selama periode tersebut, DEA juga mencatat peningkatan kematian akibat overdosis heroin dan ketersediaan kokain di pasar AS (Haryono 2017).

Tugas utamanya meliputi investigasi dan penuntutan terhadap pelanggar utama undang-undang zat terlarang yang beroperasi lintas negara bagian dan internasional termasuk kelompok dan penjahat narkoba yang menggunakan kekerasan, serta menciptakan rasa takut di masyarakat. Selain itu, lembaga ini bertanggung jawab atas manajemen program intelijen narkoba nasional.

Program ini melibatkan kerja sama dengan pejabat di tingkat federal, negara bagian, lokal, dan asing untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi strategis maupun operasional. Selain itu, dilakukan kerja sama dan koordinasi yang kuat dengan berbagai tingkat pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk meningkatkan penegakan hukum dan memanfaatkan potensi investigasi lintas yurisdiksi (United States Drug Enforcement Administration, t.t.).

b. *Department of Health & Human Services (HHS)*

- *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* mengidentifikasi dan menangani risiko kesehatan yang terus muncul yang menyebabkan kematian dan kecacatan bagi warga Amerika Serikat Menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mencegah penyakit. mempromosikan masyarakat, lingkungan, dan cara hidup yang sehat dan aman.
- *Food and Drug Administration (FDA)* melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin keselamatan, kemanjuran, dan keamanan obat-obatan, produk biologis, dan perangkat medis untuk manusia dan hewan, serta kolaborasi dengan DEA dalam penjadwalan obat-obatan di bawah Undang-Undang Zat Terkendali Berkolaborasi dengan CBP untuk mencegah impor obat yang tidak disetujui dan memeriksa distribusi obat-obatan yang disetujui untuk dipasarkan di Amerika Serikat.
- *National Institutes of Health* bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan

meningkatkan pengetahuan medis, termasuk *National Institute on Drug Abuse (NIDA)*, yang membantu penelitian tentang alasan dan akibat penyalahgunaan narkoba.

- *Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)* menciptakan metode dan keterampilan terbaik untuk mencegah dan mengobati gangguan mental dan penggunaan zat. Mengevaluasi dan menyebarkan praktik kesehatan perilaku yang kuat. Dengan dana hibah, mendukung program dan layanan kesehatan perilaku (Goodwin 2018).

c. *Department of Homeland Security (DHS)* berusaha untuk meningkatkan keamanan AS. Bea cukai, penegakan hukum perbatasan dan imigrasi, tanggap darurat bencana alam dan bencana buatan manusia, tugas antiterorisme, dan keamanan siber adalah semua tanggung jawab departemen ini (“U.S. Department of Homeland Security (DHS) | USAGov,” t.t.). Misi DHS sangat penting karena teroris yang dikenal, penjahat, teroris dalam negeri, teroris siber, penyelundup, organisasi kriminal transnasional dan "pelaku tunggal" yang tak terduga menimbulkan ancaman terhadap cara hidup kita saat ini dan di masa mendatang.

DHS beroperasi secara luas dan 24 jam sehari untuk mengatasi ancaman yang terus berubah terhadap keamanan dan ketahanan negara kita serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. DHS akan menggunakan segala cara yang tersedia, termasuk tenaga kerja yang sangat terlatih, penghalang fisik yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik, teknologi yang lebih baik, sistem identifikasi biometrik, dan intelijen

terbaik (General Services Administration & the Office of Management and Budget 2021).

- d. *Department of Justice (DOJ)* adalah departemen tingkat kabinet di cabang eksekutif pemerintah federal Amerika Serikat. Melindungi hak-hak sipil, menjaga keamanan negara, dan menegakkan supremasi hukum adalah tugas dari DOJ (“Department of Justice | Organization, Mission and Functions Manual | United States Department of Justice” 2022) DOJ didirikan pada tahun 1870, di bawah pemerintahan Presiden Ulysses S. Grant. DOJ mewakili dan membela pemerintah AS dalam proses hukum, termasuk kasus-kasus yang didengar oleh Mahkamah Agung. Selain itu, DOJ mengawasi operasi lembaga penegak hukum federal seperti *Federal Bureau of Investigation (FBI)* dan *Drug Enforcement Administration (DEA)* (Longley, t.t.).
- e. *Department of Defense (DoD)* mengidentifikasi dan mengawasi perdagangan narkoba terlarang serta mendukung interdiksi internasional dan antar lembaga.
- f. *Department Of State* membantu pemerintah asing menjalankan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi permintaan dan pasokan obat terlarang (Goodwin 2018).

3.2.6 *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Dari kebijakan *Executive Order 13784*, pendanaan dan pengelolaan komisi dilaksanakan melalui peran ONDCP. Sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan pendanaan yang ditetapkan Presiden, ONDCP berkewajiban menyalurkan dana

yang telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan Komisi. Di samping itu, ONDCP juga memberikan dukungan administratif agar pelaksanaan tugas Komisi berjalan lancar. Anggota Komisi tidak menerima kompensasi tambahan atas keterlibatannya, namun bagi anggota yang berasal dari warga sipil Amerika Serikat, selama menjalankan tugas mereka berhak memperoleh biaya perjalanan serta uang saku harian sebagai pengganti biaya hidup sesuai ketentuan peraturan yang berlaku bagi pegawai pemerintah yang bertugas sementara dengan ketentuan dana tersedia (The American Presidency Project 2017).

Untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga Amerika, pemerintah bekerja sama dengan penegak hukum, responden pertama, penyedia layanan kesehatan, organisasi berbasis komunitas, dan individu lainnya, solusi berkelanjutan memerlukan kolaborasi di semua tingkat pemerintahan (House 2025). Institut Kesehatan Nasional telah memulai studi multi-tahun senilai \$350 juta untuk mengurangi kematian akibat overdosis opioid hingga 40% di empat negara bagian.

Pemerintah telah menyetujui hibah lebih dari \$93 juta untuk membantu orang yang terkena dampak kecanduan opioid bergabung kembali dengan dunia kerja (Barbara 2019). Pada tahun 2021, diperkirakan 2,5 juta orang berusia 18 tahun ke atas mengalami gangguan penggunaan opioid; namun, para peneliti menemukan bahwa hanya 36% dari mereka yang mendapatkan perawatan untuk penyalahgunaan zat dan hanya 22% yang menerima pengobatan untuk gangguan penggunaan opioid (Abuse 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, fungsi dan sumber daya SAMHSA (*Substance Abuse and Mental Health Services Administration*), lembaga federal yang bertanggung jawab atas upaya kesehatan perilaku, telah meningkat. Secara

nasional, SAMHSA mengelola program hibah utama yang mendukung pencegahan, perawatan, dan dukungan pemulihan. Pendanaan untuk program-program ini telah meningkat secara signifikan di bawah pemerintahan Trump.

Misalnya, anggaran tahun fiskal 2018 SAMHSA untuk program perawatan penyalahgunaan zat meningkat dari sekitar \$2,1 miliar pada tahun fiskal 2016 menjadi \$3,7 miliar pada tahun fiskal 2018 (Duff 2020). Empat pusat yang diresmikan oleh SAMHSA menjalankan sebagian besar program dan operasinya, yang berfokus pada perawatan penyalahgunaan zat, pencegahan penyalahgunaan zat, layanan kesehatan mental, dan pengawasan kesehatan, serta dukungan program:

1. *The Center for Substance Abuse Treatment (CSAT)*

Salah satu tugas utama *Center for Substance Abuse Treatment (CSAT)* adalah untuk mendorong perawatan dan pemulihan berbasis komunitas bagi mereka yang mengalami gangguan penggunaan zat (Duff 2020).

2. *The Center for Substance Abuse Prevention (CSAP)*

Salah satu tugas utama *Center for Substance Abuse Prevention (CSAP)* adalah mencegah penyalahgunaan dan penggunaan alkohol, tembakau, obat resep, dan obat-obatan terlarang oleh orang dewasa dan anak-anak (Duff 2020).

3. *The Center for Mental Health Services (CMHS)* memimpin program federal untuk mencegah dan mengobati gangguan mental. Tujuan CMHS meliputi pencegahan penyakit mental dan promosi kesehatan mental; CMHS bertanggung jawab untuk memimpin upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mental; menyediakan bantuan teknis kepada

badan kesehatan mental negara bagian dan lokal; dan mengumpulkan data (Duff 2020).

4. *The Center for Behavioral Health Statistics and Quality (CBHSQ)*

Mengumpulkan dan menganalisis statistik kesehatan perilaku. CBHSQ adalah lembaga utama pemerintah federal untuk statistik kesehatan perilaku. CBHSQ mengelola arsip data dan melakukan penelitian tentang kualitas, akses, biaya, hasil, kebijakan, praktik kesehatan perilaku, dan kebijakan (Duff 2020).

3.3 Context of Implementation (Lingkungan Implementasi)

3.3.1 Power, interest, and strategy of actor involved (Kekuasaan, Kepentingan- Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Prioritas pemerintahan Trump adalah mengurangi peredaran narkoba terutama yang masuk ke AS dari Meksiko. Peredaran ini berkontribusi pada krisis opioid dan tingginya angka kematian akibat overdosis. Kepentingan ini berpusat pada keamanan nasional dan kesehatan publik Amerika Serikat; dalam hal ini, kebijakan Trump, yang mencakup pengetatan kontrol perbatasan dan ancaman terhadap Meksiko, bertujuan untuk memerangi aliran narkoba seperti fentanyl. Meskipun demikian, metode ini menunjukkan ketidakseimbangan kebijakan karena mengutamakan keamanan domestik AS tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial dan politik di Meksiko.

1. Presiden Donald Trump

Trump menyatakan bahwa imigran Meksiko membawa banyak imigran ilegal dan penyelundupan narkoba, khususnya berkaitan dengan ancaman

yang datang dari Meksiko (Pudiasari 2019). Kekerasan mematikan antara geng kriminal dan kartel narkoba yang berjuang untuk menguasai wilayah telah lama mengganggu Meksiko (U. Idris 2019). Trump menawarkan bantuan untuk membantu pemerintah Meksiko memberantas kartel narkoba setelah serangan brutal terhadap warga AS di Meksiko. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara kedua negara dalam memerangi perdagangan narkoba (Tempo 2019).

Donald Trump juga menetapkan tarif tinggi terhadap Meksiko, Kanada, dan China. Tarif ini akan berlaku untuk semua barang yang diimpor dari Meksiko dan Kanada. Ini merupakan bentuk "hukuman" Trump terhadap perdagangan ilegal narkoba dan imigran gelap. Kebijakan Trump dianggap melanggar kesepakatan perdagangan bebas Meksiko dan Kanada dengan Amerika Serikat, dan tarif itu akan tetap berlaku sampai semua narkoba dan imigran gelap keluar dari AS (Aulia 2024).

2. *Office of National Drug Control Policy (ONDCP)*

Office of National Drug Control Policy (ONDCP) adalah bagian dari Kantor Eksekutif Presiden yang berfokus pada pengurangan penggunaan narkoba serta dampaknya dengan memimpin dan mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan narkoba di Amerika Serikat. Selain menjalankan peran penting tersebut secara berkelanjutan, ONDCP juga berfungsi memberikan dukungan administratif maupun pendanaan bagi komisi Presiden untuk memerangi kecanduan narkoba dan krisis opioid yang dibentuk melalui Perintah Eksekutif Presiden Donald J. Trump pada 29 Maret 2017 (Office of National Drug Control Policy, t.t.).

ONDCP membantu meningkatkan kesehatan dan kehidupan rakyat Amerika melalui pengawasan dan koordinasi kebijakan obat-obatan terlarang nasional. ONDCP bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan strategi dan anggaran pengendalian obat-obatan terlarang nasional. Selain itu, melalui program area perdagangan obat terlarang intensitas tinggi dan program komunitas bebas obat terlarang, ONDCP menyediakan ratusan juta dolar untuk membantu masyarakat menjaga keamanan dan kesehatan (The White House, t.t.).

Dalam undang-undang *SUPPORT for Patients and Communities* tahun 2018, pemerintah mengesahkan kembali ONDCP hingga tahun 2023, sekaligus memperluas mandatnya dan menambahkan sejumlah perubahan penting. UU ini menciptakan posisi koordinator di ONDCP, bertanggung jawab atas koordinasi penanganan masalah utama narkoba. Selain itu, UU ini mengesahkan kembali dua program utama ONDCP, yaitu program hibah *High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA)* dan komunitas bebas narkoba.

Komite ancaman baru dibentuk untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan tindakan untuk menghadapi potensi krisis narkoba di masa depan. Selain itu, UU ini memungkinkan sebagian dari dana yang diterima dari program HIDTA digunakan untuk kegiatan pencegahan dan pengobatan. Dalam hal teknologi dan transparansi, dibuat dashboard data pengawasan obat secara online yang memiliki fitur pencarian dan sistem pelacakan hibah untuk mengawasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran hibah federal terkait narkoba (Office of National Drug Control Policy, t.t.).

ONDCP bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pengendalian narkoba nasional serta menulis dan mengeluarkan strategi narkoba setiap tahun sesuai dengan undang-undang (FPC Briefing 2017). ONDCP mengawasi dan mengatur kebijakan narkoba nasional untuk meningkatkan kesehatan dan kehidupan rakyat Amerika. ONDCP bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan Strategi dan Anggaran Pengendalian Narkoba Nasional.

3.3.2 *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang Sedang Berkuasa)

Dengan dukungan Partai Republik yang menguasai eksekutif dan legislatif, pemerintahan Donald Trump (2017–2021) menciptakan rezim yang kuat secara politik untuk mendorong kebijakan narkoba agresif dan represif. Pemerintahan Trump secara bersamaan mengurangi intervensi awal untuk masalah kecanduan dan kesehatan mental, menghentikan lebih dari \$1 miliar hibah era COVID yang dikelola oleh Badan Layanan Penyalahgunaan Zat dan kesehatan mental serta menandatangani *HALT Fentanyl Act*, yang mengkategorikan analog fentanyl sebagai zat paling berbahaya dengan hukuman minimal 10 tahun penjara untuk kepemilikan 100 gram atau lebih fentanyl.

Meskipun RUU yang dibuat untuk meringankan masalah ini memasukkan ketentuan baru, peneliti yang mempelajari zat terlarang harus mendaftar ke DEA dan mematuhi protokol yang ketat (Edwards dkk. 2025). Komprehensif, Undang-Undang dukungan untuk pasien dan komunitas tahun 2018, yang disahkan oleh dua belah pihak untuk mengatasi krisis opioid, ditandatangani Presiden Trump pada

Oktober 2018, dan akan menjadi landasan kebijakan kecanduan federal hingga tahun 2025. Undang-undang tersebut mencakup pencegahan, perawatan, pemulihan, dan penegakan hukum. Khususnya, undang-undang ini menghilangkan banyak hambatan bagi pasien dan penyedia layanan serta memperluas akses perawatan di *Medicare dan Medicaid* (Valentine 2018) Langkah utamanya meliputi:

- *Medicaid IMD Exclusion Reform*: Undang-undang ini mencabut sebagian dari "pengecualian IMD" *Medicaid* yang telah lama berlaku. Ini memungkinkan negara bagian menerima dana federal untuk menanggung perawatan rawat inap di fasilitas residensial (Institusi untuk Penyakit Mental) selama 30 hari per pasien per tahun. Ini adalah perubahan yang signifikan dari sebelumnya, dimana Medicaid tidak dapat membiayai orang dewasa berusia 21-64 tahun di fasilitas kesehatan mental.
- *Children's Health Insurance Program (CHIP)* meminta semua program CHIP negara bagian untuk memberikan layanan kesehatan 58 mental dan SUD bagi ibu hamil dan anak-anak setara dengan manfaat medis dan bedah. Hal ini memastikan cakupan penting bagi remaja dan ibu hamil dengan masalah perilaku.
- *Expanding the Addiction Treatment Workforce*: Undang-undang memperluas wewenang persepsan untuk perawatan berbantuan obat *medication-assisted treatment (MAT)* untuk memungkinkan lebih banyak penyedia perawatan. Untuk gangguan penggunaan opioid, undang-undang ini mempermanenkan kemampuan praktisi perawat dan asisten dokter untuk meresepkan buprenorfin.

- *Medicare Coverage Improvements* untuk pertama kalinya, *Medicare* akan membayar perawatan OUD yang disediakan oleh program perawatan opioid (OTP seperti klinik metadon) melalui Undang Undang *SUPPORT*. Mulai tahun 2020, penyandang disabilitas dan orang tua yang terdaftar di *Medicare* dengan kecanduan opioid akan memiliki akses ke perawatan metadon sebagai manfaat yang ditanggung.
- *Support for Alternative Pain Management*: Undang-undang ini memulai inisiatif untuk mendorong alternatif opioid dalam manajemen nyeri dalam konteks pencegahan (Behave Health 2025).

Menurut Grindle, karakteristik institusi pelaksana dan rezim sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, karena stabilitas politik, kemampuan birokrasi, dan komitmen pemerintah akan menentukan seberapa efektif dan berkelanjutan kebijakan dapat diterapkan (Grindle 2017).

3.3.3 *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Barack Obama dan Donald Trump telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah narkoba yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Amerika Serikat. Program dan kebijakan mereka masih dikritik. Sebagian orang berpendapat bahwa kebijakan Obama dan Trump masih berfokus pada hukuman dan kurang memperhatikan pencegahan dan rehabilitasi penggunaan narkoba.

Meskipun sektor yang diambil alih oleh Donald Trump sudah memulai upaya untuk mengatasi krisis opioid melalui penerapan strategi pencegahan

penyalahgunaan narkoba. Namun, karena angka kasus pengguna narkoba — segala jenis obat yang dilarang oleh undang-undang Amerika Serikat — masih tinggi, banyak orang yang tidak puas dengan tindakan Donald Trump (Collins, Donald Trump's interim Opioid Commission report did not mention drug courts. Here's why that's a positive step, 2017).

Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kriminalisasi dapat mengurangi jumlah orang yang menggunakan narkoba. Selama empat puluh tahun, Amerika Serikat telah mencobanya dengan penahanan massal pengguna narkoba. Namun, upaya ini tidak berhasil. Sebagian besar orang Amerika mendukung pemerintah untuk memulai "Perang terhadap Narkoba" dan menguji kebijakan baru yang lebih ampuh. Pada akhirnya, orang Amerika lebih suka menganggap masalah narkoba ini sebagai masalah kesehatan publik daripada masalah hukum pidana. Dekriminalisasi adalah pilihan yang tepat karena akan meningkatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba (ICJR 2017).

Langkah-langkah Trump dalam memerangi narkoba mungkin lebih bersifat simbolik dan politis daripada memiliki hasil jangka panjang. Banyak programnya gagal menurunkan peredaran narkoba atau angka kematian akibat overdosis karena kurangnya pendekatan berbasis kesehatan masyarakat, rehabilitasi, dan kerja sama yang konsisten. Dalam politik dalam negeri Amerika Serikat ada tekanan yang kuat dari kelompok politik terhadap pemerintah untuk menangani krisis opioid dan meningkatnya jumlah kematian akibat overdosis, yang semakin memperburuk desakan untuk mengambil tindakan tegas terhadap kartel narkoba.

Pendekatan penegakan hukum yang ketat dalam kebijakannya untuk memerangi kartel narkoba, Trump merencanakan untuk mengklasifikasikan kartel Meksiko sebagai kelompok teroris, tindakan yang kontroversial yang ditolak oleh pemerintah Meksiko karena mereka khawatir akan intervensi lebih lanjut dalam urusan dalam negeri mereka (*CNN Indonesia*. 2019).

3.4 Outcomes (Hasil atau Analisis dari *Content of Policy* dan *Context of Implementation*)

3.4.1 Impact on Society, Individuals, and Groups (Dampak pada Masyarakat, Individu, dan Kelompok)

Kartel menculik dan membunuh bisnis kecil di wilayah kekuasaan Amerika Serikat. Selain merugikan masyarakat kartel narkoba juga merugikan negara (Idris dan Togatorop 2023). Presiden Donald Trump telah berjanji untuk menghancurkan kartel Meksiko dan mengakhiri epidemi fentanil di Amerika Serikat, tetapi bantuan besar dari negara lain telah dihentikan sementara program anti narkoba Meksiko yang didanai AS telah berusaha untuk menghentikan aliran opioid sintetis ke Amerika Serikat (Syafira 2025).

Presiden AS Donald Trump telah menghentikan bantuan luar negeri, menghentikan program PBB di Meksiko. Programnya bertujuan untuk mencegah impor bahan kimia fentanil agar tidak masuk ke kartel narkoba negara itu. Program ini membantu pemerintah daerah memeriksa kargo dengan lebih baik dalam upaya untuk mengalokasikan dana sekitar \$800.000 untuk meluncurkan proyek di Pelabuhan Manzanillo pada tahun 2023 (Maulana 2025).

Dari 29 orang yang ditahan di penjara di Meksiko, salah satu dari mereka adalah mantan pemimpin kartel Guadalajara, Rafael Caro Quintero, yang dicari oleh Amerika Serikat atas pembunuhan agen DEA, Enrique "Kiki" Camarena, pada tahun 1985. Langkah itu diambil sebagai tanggapan atas penetapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kartel narkoba Meksiko sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). Lembaga setingkat kabinet yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan dan keselamatan publik, Sekretariat Keamanan dan Perlindungan Sipil (SSCP) Meksiko, menyatakan bahwa ekstradisi para penjahat kelas kakap tersebut merupakan bentuk kerja sama dengan AS (antaranews.com 2025b).

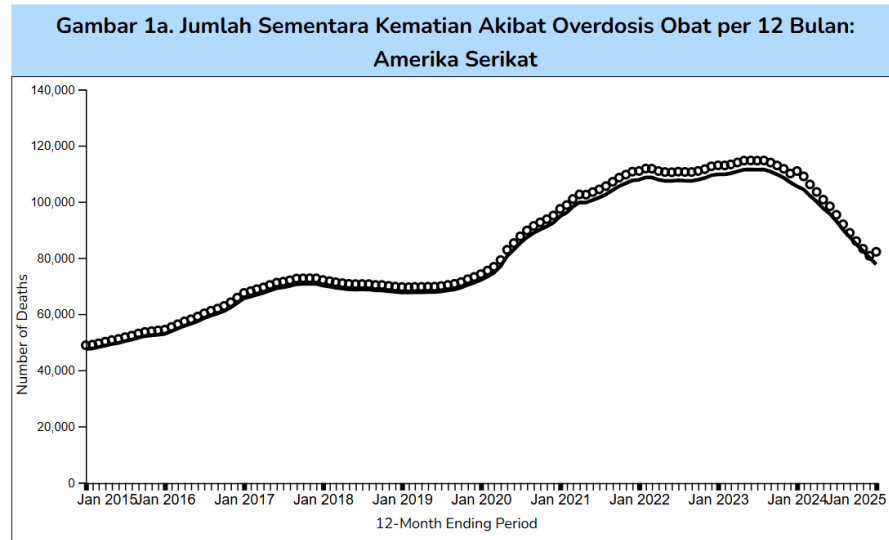
Kebijakan seperti ini mengalami banyak perubahan memerlukan dukungan politik yang kuat, sumber daya yang memadai dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan negara, menurut Grindle. Namun, dalam situasi ini tindakan AS yang tidak konsisten dan agresif menyebabkan ketegangan diplomatik dengan Meksiko, yang menolak intervensi militer dan menekankan pentingnya kedaulatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan derajat perubahan yang tinggi dapat menghadapi hambatan besar jika tidak bekerja sama dan bekerja sama dengan baik.

Data sementara dari Pusat Statistik Kesehatan Nasional CDC menunjukkan sekitar 107.622 kematian akibat overdosis obat di Amerika Serikat selama tahun 2021. Ini adalah peningkatan hampir 15% dari 93.655 kematian yang diperkirakan pada tahun 2020. Jumlah kematian akibat overdosis meningkat 30% dari tahun 2019 hingga 2020. Kematian akibat overdosis opioid meningkat dari 70.029 pada tahun 2020 menjadi 80.816 pada tahun 2021, menurut data terbaru. Dibandingkan dengan tahun 2020, kematian akibat overdosis opioid sintetis (terutama fentanil),

psycho stimulan (termasuk metamfetamin), dan kokain terus meningkat pada tahun 2021.

Gambar 3. Jumlah Kematian Akibat Overdosis Tahun 2015-2025

Berdasarkan data yang tersedia untuk analisis pada: 1 Juni 2025



Sumber:(“Products - Vital Statistics Rapid Release - Provisional Drug Overdose Data” 2025).

Jumlah kematian sementara akibat overdosis obat yang dilaporkan dan diperkirakan secara nasional dan di setiap yurisdiksi. Peta persentase perubahan kematian akibat overdosis obat sementara di Amerika Serikat untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada Desember 2021, dibandingkan dengan periode dua belas bulan yang berakhir pada Desember 2020. Jumlah kematian sementara yang dilaporkan dan diproyeksikan akibat overdosis obat yang melibatkan obat-obatan atau jenis obat tertentu yang terjadi secara nasional dan di yurisdiksi tertentu.

NCHS merilis jumlah kematian sementara akibat overdosis obat, baik yang dilaporkan maupun yang diprediksi, setiap bulan. Jumlah ini menunjukkan jumlah kematian akibat overdosis obat yang terjadi selama dua belas bulan yang berakhir pada bulan yang ditunjukkan. Jumlah ini mencakup semua musim setahun dan tidak

terpengaruh oleh perubahan musim. Kematian dilaporkan ke yurisdiksi di mana kematian terjadi (“Products - Vital Statistics Rapid Release - Provisional Drug Overdose Data” 2025)

Gambar 4. Jumlah Kematian Berdasarkan Jenis Obat

JENIS OBAT	(KEMATIAN 2021)	(KEMATIAN 2020)
Opioid Sintetis (fentanil)	71.238	57.834
Psikostimulan (sabu)	32.856	24.576
Kokain	24.538	19.927
Alami/semi-sintetis (resep)	13.503	13.722

Sumber: (“U.S. Overdose Deaths In 2021 Increased Half as Much as in 2020 - But Are Still Up 15%” 2022)

Pemerintahan Trump menerapkan strategi komprehensif yang menyeimbangkan keselamatan publik dan kesehatan masyarakat untuk memerangi epidemi opioid. Tujuan strategi ini adalah untuk mengurangi penggunaan narkoba seperti opioid, kokain, ganja, metamfetamin, dan narkoba lainnya di kalangan warga Amerika. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan upaya penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan narkoba ilegal dan mengadakan kampanye untuk memberitahu orang tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk mengelola kecanduan dengan baik, Anda harus memiliki akses ke layanan perawatan. Hanya 11% dari 21,3 juta warga Amerika yang mengalami gangguan penggunaan zat mendapatkan perawatan di fasilitas khusus pada tahun 2018.

Strategi pemerintahan Trump untuk menangani krisis opioid dan masalah narkoba telah menuai kritik karena tidak efektif. Terlepas dari fakta bahwa ada laporan penurunan kematian akibat overdosis obat pereda nyeri opioid resep pada

tahun 2018, tren umum berbalik dengan rekor tertinggi 70.000 kematian pada tahun yang sama dan 72.000 kematian pada tahun 2019. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang jumlah upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis saat ini (socialreco 2024). Selama beberapa dekade terakhir, upaya pengendalian narkoba yang demiliterisasi di Meksiko tidak berhasil melawan perdagangan narkoba ilegal atau kekerasan, dan telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Brewer dkk. 2024).

3.4.2 Change and its Acceptance (Perubahan dan Penerimaannya)

Dengan memberikan lebih banyak pilihan, perawatan yang lebih baik, dan penurunan biaya, visi layanan kesehatan Presiden Trump mengutamakan pasien, keluarga, dan orang tua Amerika. Sejak awal, ia telah berusaha untuk mengembalikan layanan kesehatan ke tangan rakyat Amerika. Pemerintahan Trump mengambil tindakan bersejarah untuk menurunkan harga obat resep, memperluas akses ke asuransi kesehatan murah, meningkatkan transparansi mengenai biaya asuransi dan rumah sakit, dan memberikan warga Amerika akses ke dokter terpercaya.

Presiden Trump berulang kali mendesak Kongres untuk mengambil tindakan dan dia menandatangani undang-undang untuk mengakhiri tagihan medis yang mengejutkan, berjanji akan selalu melindungi orang-orang dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya (United States Drug Enforcement Administration, t.t.).

Amerika Serikat dan Meksiko akan bekerja sama untuk memprioritaskan penyelundup narkoba yang menyelundupkan fentanil dan opioid lainnya ke Amerika Serikat. Mereka dapat menargetkan kelompok-kelompok tersebut dengan

mengejar gembongnya dan mengumpulkan sebanyak mungkin jaringan mereka di kedua sisi perbatasan dalam operasi besar yang didasarkan pada penuntutan dan intelijen yang baik. Operasi ini dapat secara signifikan melemahkan kemampuan operasional kelompok-kelompok kriminal, meskipun mereka membutuhkan waktu dan kesabaran dari satuan tugas gabungan AS dan Meksiko (Wayne dkk. 2019).

Krisis opioid sintetis dan kematian akibat overdosis, kampanye ini muncul di tengah krisis overdosis opioid sintetis di Amerika Serikat, di mana diperkirakan 50.000–60.000 orang akan meninggal karena overdosis opioid sintetis, sebagian besar karena konsumsi fentanyl dan obat-obatan terkait. Terlepas dari fakta bahwa jumlah kematian yang disebabkan oleh opioid sintetis meningkat lebih dari dua kali lipat selama masa kepresidenan Trump dari 2017-2021, masalah ini tetap menjadi topik utama selama kampanyenya untuk pemilihan presiden 2024 (Mediatama 2024).

Selain itu, 62% responden menyatakan bahwa pemerintahan Trump tidak menghormati supremasi hukum, 65% menyatakan bahwa pemerintahan Trump telah berusaha menghindari keputusan pengadilan federal, dan 64% menyatakan bahwa pemerintahan Trump telah memperluas kekuasaan presiden (antaranews.com 2025a). Krisis opioid sintetis dan kematian akibat overdosis kampanye ini muncul di tengah krisis overdosis opioid sintetis di Amerika Serikat, dimana diperkirakan 50.000–60.000 orang akan meninggal karena overdosis opioid sintetis, sebagian besar karena konsumsi fentanyl dan obat-obatan terkait (Mediatama 2024).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS terhadap peredaran narkoba di Meksiko selama pemerintahan Presiden Donald Trump didasarkan pada keamanan nasional, stabilitas domestik, dan perlindungan generasi muda dari efek narkoba. Kebijakan ini dilaksanakan oleh banyak pihak, termasuk Presiden Donald Trump, *Office of National Drug Control Policy (ONDCP)*, *Department of State*, *Department of Defense (DoD)*, dan *Department of Justice (DOJ)* dan *Drug Enforcement Administration (DEA)*.

Menjaga keamanan nasional adalah prioritas utama Amerika Serikat. Hal ini dicapai dengan mencegah masuknya barang terlarang ke negara tersebut, melindungi masyarakat dari efek kesehatan yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba dan mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh peredaran narkotika. Kepentingan politik domestik juga mempengaruhi kebijakan karena kebijakan ini merupakan bukti upaya Trump untuk memenuhi janji politiknya terkait penguatan perbatasan dan penegakan hukum.

Implementasi kebijakan *Executive Order 13784* yang membentuk Komisi Presiden untuk memerangi kecanduan narkoba dan krisis opioid, kebijakan ini mulai diterapkan. Kebijakan ini memungkinkan Amerika Serikat untuk memperketat pengawasan di perbatasan selatan, meningkatkan kerja sama penegakan hukum dengan Meksiko, dan meningkatkan kemampuan lembaga yang menangani narkotika. Selain itu, program kerja sama mencakup peningkatan

pelatihan aparat, bantuan keuangan, dan pertukaran informasi intelijen. Namun kebijakan yang efektif masih menghadapi tantangan seperti kartel narkoba yang kuat, koordinasi bilateral yang lemah di beberapa bagian dan pengaruh politik domestik yang sering membatasi kerja sama.

Tabel 1. Implementasi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Peredaran Narkotika dari Meksiko Tahun 2017-2021

Indikator	Sub Indikator	Realisasi dalam Implementasi Kebijakan
<i>Policy Goals</i> (Tujuan Kebijakan)		Melawan krisis opioid, serta penyalahgunaan, kecanduan, dan overdosis narkoba, sebagaimana diatur dalam <i>Executive Order 13784</i> yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump Komisi Presiden dibentuk, meningkatkan peran DEA dan bekerja sama dengan Meksiko untuk menghentikan peredaran narkoba lintas batas.
<i>Content of Policy</i> (Isi Kebijakan)	<i>Interest Affected</i> (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)	Peredaran narkoba di Meksiko berdampak pada keamanan nasional (ancaman kartel Sinaloa dan CJNG), kesehatan masyarakat (krisis fentanyl dan opioid), ekonomi (biaya kesehatan dan produktivitas), dan sosial dan keluarga (trauma, kriminalisasi, keretakan sosial).
	<i>Type of Benefits</i> (Tipe Manfaat)	Manfaat dari kebijakan pertama, penyediaan obat darurat seperti nalokson mengurangi risiko kematian akibat overdosis. Kedua, mengurangi biaya sosial-ekonomi karena beban kesehatan publik berkurang dan produktivitas tenaga kerja meningkat. Ketiga, mengurangi kriminalitas melalui pembubaran jaringan kartel dan penguatan hukum. Keempat, meskipun ada

		tantangan politik, ada keuntungan diplomatis dari peningkatan kerja sama bilateral AS-Meksiko. Secara umum, tujuan kebijakan adalah untuk meningkatkan ketahanan sosial, memperkuat supremasi hukum, dan menjaga stabilitas nasional Amerika Serikat.
	<i>Extent of Change envision</i> (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)	Penurunan drastis angka kematian akibat overdosis, pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dan pemutusan hubungan dengan Meksiko tentang pasokan narkoba merupakan tujuan utama pemerintahan Trump. Penegakan hukum yang lebih ketat, patroli perbatasan yang lebih ketat, dan kampanye pendidikan publik secara nasional semuanya diprioritaskan dalam kebijakan ini. Melalui tekanan diplomatik terhadap Meksiko untuk bekerja sama melawan kartel, ada kemungkinan perubahan di tingkat nasional dan internasional.
	<i>Site of Decision Making</i> (Letak Pengambilan Keputusan)	Keputusan Presiden Trump di Gedung Putih (Washington, DC) menetapkan kebijakan narkoba era Trump secara langsung di tingkat federal. Karena presiden memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan eksekutif, pengambilan keputusan ini bersifat sentralistik. Kebijakan diterapkan secara nasional dengan menggunakan seluruh aparat federal, tetapi juga memaksa pemerintah negara bagian untuk mematuhi kebijakan pusat.

	<p><i>Program Implementer</i> (Pelaksana Program)</p>	<p>Banyak lembaga terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk (1) DEA sebagai penegak utama dalam investigasi dan penindakan kartel narkoba lintas negara; (2) Departemen Kehakiman menjalankan proses hukum dan pengadilan; (3) DHS mengawasi perbatasan, imigrasi, dan bea cukai; (4) DoD mendukung operasi interdiksi narkoba; (5) Departemen Negara berurusan dengan kerja sama dengan Meksiko dan negara lain; dan (6) HHS (CDC, FDA, NIH, SAMHSA) berkonsentrasi pada masalah kesehatan masyarakat, Oleh karena itu, implementasi bersifat multidisipliner dan lintas sektor.</p>
	<p><i>Resources Committed</i> (Sumber Daya yang Digunakan)</p>	<p>Pemerintah Amerika Serikat menyediakan sumber daya yang signifikan. Dana federal diberikan kepada ONDCP untuk mendukung operasi Komisi Presiden. Untuk membantu mengurangi tingkat overdosis opioid, <i>National Institute of Health (NIH)</i> mendanai \$350 juta untuk penelitian. Di tahun 2018, SAMHSA meningkatkan dana hibah untuk perawatan penyalahgunaan zat dari \$2,1 miliar (2016) menjadi \$3,7 miliar. Miliaran dolar juga dialokasikan untuk mendukung inisiatif Merida dengan Meksiko dalam hal pelatihan polisi, infrastruktur keamanan, dan teknologi deteksi perbatasan. Dana, staf, teknologi, dan logistik obat-obatan seperti nalokson adalah beberapa sumber daya yang mendukung ini.</p>

<p><i>Context of Implementation</i> (Lingkungan Implementasi)</p>	<p><i>Power, Interest, and Strategy of Actors Involved</i> (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor)</p>	<p>Implementasi kebijakan narkoba yang dibuat selama pemerintahan Donald Trump melibatkan berbagai pihak yang memiliki kekuasaan, kepentingan, dan pendekatan yang berbeda. Keamanan nasional dan kesehatan publik menjadi prioritas utama Trump, yang menggunakan strategi koersif seperti pengetatan perbatasan, ancaman militer dan tarif perdagangan untuk menekan Meksiko. Sebaliknya, ONDCP memperkuat pelaksanaan dengan menyeimbangkan penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi dengan mengelola anggaran besar dan menjalankan program seperti <i>High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA)</i> dan <i>Drug-Free Communities</i>.</p>
	<p><i>Institution and Regime Characteristics</i> (Karakteristik Lembaga dan Rezim)</p>	<p>Kebijakan pengamanan perbatasan adalah ciri khas pemerintahan Trump. Di Amerika Serikat, Kepresidenan memberi eksekutif banyak kekuasaan yang memungkinkan keputusan cepat tentang kebijakan narkoba. Sementara kerja sama Internasional lebih pragmatis dan berdasarkan keamanan, lembaga penegak hukum seperti DEA dan DHS mendapat mandat yang kuat.</p>
	<p><i>Compliance and Responsiveness</i> (Kepatuhan dan Respons dari Pelaksana)</p>	<p>Karena didukung oleh dana besar dan instruksi langsung presiden, lembaga federal Amerika Serikat menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap kebijakan. Namun, tanggapan Meksiko beragam, sebagian mendukung kebijakan keras karena dianggap melindungi keamanan, sebagian mengkritik karena terlalu represif dan kurang memperhatikan aspek</p>

		rehabilitasi. Sebaliknya, mereka merasa tertekan oleh retorika keras Trump, yang dianggap merendahkan kedaulatan mereka.
<i>Outcomes</i> (Hasil Kebijakan)	<i>Impact on Society, Individuals, and Groups</i> (Dampak pada Masyarakat, Individu, dan Kelompok)	Meskipun kebijakan Trump berhasil mengurangi peredaran narkoba di beberapa titik perbatasan, krisis opioid secara keseluruhan masih berlanjut. Data menunjukkan bahwa lebih dari 100.000 orang meninggal karena overdosis pada tahun 2021. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, tetapi juga memperkuat stigma terhadap pengguna. Banyak pecandu yang berakhir di penjara atau kehilangan anggota keluarga karena overdosis, menunjukkan konsekuensi pada tingkat individu dan keluarga.
	<i>Change and Its Acceptance</i> (Perubahan dan Penerimaan)	Peningkatan operasi penegakan hukum dan keamanan perbatasan adalah salah satu perubahan besar yang dibawa oleh kebijakan Trump. Namun, ada perbedaan dalam penerimaan kebijakan ini. Sebagian masyarakat mendukung karena dianggap melindungi mereka dari ancaman narkoba, sementara pihak lain mengkritik karena dianggap meningkatkan ketegangan dengan Meksiko, represif, dan kurang memperhatikan masalah sosial-ekonomi yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penerimaan kebijakan terbagi antara yang mendukung aspek keamanan dan yang mengkritik kurangnya humanis.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat menangani peredaran narkoba lintas negara, terutama di Meksiko, yang merupakan salah satu pusat perdagangan narkoba terbesar di dunia. Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Meksiko mengalami kesulitan yang signifikan selama pemerintahan Presiden Donald Trump, terutama dalam hal kebijakan perbatasan dan keamanan.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian pada skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik secara penulisan maupun analisis yang mungkin masih dapat disempurnakan oleh peneliti lainnya. Penelitian ini secara spesifik membahas bagaimana kebijakan Amerika Serikat yang dibuat pada era Presiden Donald Trump tahun 2017-2021 terhadap narkoba dari Meksiko. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan penelitian hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan perspektif global tentang keamanan transnasional dan kebijakan narkoba.

Sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang mungkin akan membahas isu yang sama dapat membahas bagaimana tentang Kartel Narkoba dalam Mempengaruhi Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Meksiko: Studi Kasus Kartel Sinaloa dan Kartel CJNG. Judul ini menunjukkan bagaimana tindakan non-negara, seperti kartel narkoba, dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan kerja sama keamanan antara dua negara. Pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko sangat memperhatikan aktivitas Kartel Sinaloa dan CJNG, yang merupakan dua perusahaan besar dalam perdagangan narkoba di seluruh dunia. Penelitian ini memungkinkan studi mendalam tentang

bagaimana tindakan kriminal transnasional mendorong atau menghambat kerja sama antarnegara, serta bagaimana negara-negara menanggapi dengan kebijakan, operasi kolaboratif, atau tekanan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuse, National Institute on Drug. 2023. "Only 1 in 5 U.S. Adults with Opioid Use Disorder Received Medications to Treat It in 2021 | National Institute on Drug Abuse (NIDA)." Agustus 7. <https://nida.nih.gov/news-events/news-releases/2023/08/only-1-in-5-us-adults-with-opioid-use-disorder-received-medications-to-treat-it-in-2021>.
- AFP. 2023. "AS dan Meksiko Berjanji akan Lebih Berusaha Membatasi Arus Migrasi dan Narkoba." VOA Indonesia, Oktober 6. <https://www.voaindonesia.com/a/as-dan-meksiko-berjanji-akan-lebih-berusaha-membatasi-arus-migrasi-dan-narkoba/7299391.html>.
- Agency, ANTARA News. 2018. "Pemerintahan Trump batalkan kebijakan ganja masa Obama." ANTARA News Bangka Belitung. <https://babel.antarane.ws.com/berita/69356/pemerintahan-trump-batalkan-kebijakan-ganja-masa-obama>.
- Agusti, Suci. 2019. IMPLEMENTASI MERIDA INITIATIVE ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN MEKSIKO DALAM KASUS PEREDARAN NARKOTIKA. antaranews.com. 2025a. "Meksiko ekstradisi 29 pengedar narkoba ke AS." Indonesia. Antara News, Februari 28. <https://www.antarane.ws.com/berita/4680501/meksiko-ekstradisi-29-pengedar-narkoba-ke-as>.
- antaranews.com. 2025b. "Kepuasan publik terhadap Trump turun ke level terendah dalam 80 tahun." Antara News, April 29. <https://www.antarane.ws.com/berita/4801397/kepuasan-publik-terhadap-trump-turun-ke-level-terendah-dalam-80-tahun>.
- Arnanda, Nabilla Citra. 2024. "KERJASAMA MERIDA INITIATIVE ANTARA AMERIKA SERIKAT DENGAN MEKSIKO DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN NARKOBA PERIODE 2015-2019." FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Arsya, Lucky Yusuf. 2020. "Kartel Sinaloa Sebagai Faktor Penghambat Merida Initiative Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Dari Meksiko Ke Amerika Serikat." Universitas Airlangga.
- Aulia, Luki. 2024. "Hari Pertama Menjabat, Trump Ancam Kenakan Tarif Tinggi pada China, Kanada, Meksiko." Kompas.id, November 26.
- Barbara, Santa. 2019. "Lembar Fakta - Presiden Donald J. Trump Telah Mendedikasikan Pemerintahannya untuk Melawan Krisis Opioid | Proyek Kepresidenan Amerika." The American Presidency Project. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/fact-sheet-president-donald-j-trump-has-dedicated-his-administration-fighting-back-against>.
- Behave Health. 2025. "2025 Federal Addiction and Mental Health Treatment Policies Under Trump — Behavehealth.Com." Februari 11.
- Beittel, June S. 2019. "Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations." Congressional Research Service 21 (2): 181--223.
- Berlianto. 2021. "Terungkap, Trump Ingin Kirim Pasukan AS ke Meksiko untuk Buru Kartel Narkoba." <https://international.sindonews.com/read/574698/42/terungkap-trump->

- ingin-kirim-pasukan-as-ke-meksiko-untuk-buru-kartel-narkoba-1634753427.
- Brewer, Stephanie, Adam Isacson, dan John Walsh. 2024. "Trump's Threats of Tariffs as a Response to Migration and the Fentanyl Overdose Crisis." WOLA. <https://www.wola.org/analysis/trumps-threats-of-tariffs-as-a-response-to-migration-and-the-fentanyl-overdose-crisis/>.
- CNN Indonesia. 2019. "Mengenang Tragedi 9/11 di AS 18 Tahun Silam." September 11.
- Cooper, James M. t.t. The United States, Mexico, and the War on Drugs in the Trump Administration.
- "Department of Justice | Organization, Mission and Functions Manual | United States Department of Justice." 2022. Desember 6. <https://www.justice.gov/doj/organization-mission-and-functions-manual>.
- Dewi, Kristina Puspita. 2015. "Kebijakan Luar Negeri War On Drugs Amerika Serikat Terhadap Meksiko Tahun 2006-2010: Merida Initiative." Universitas Airlangga.
- Duff, Johnathan H. 2020. "Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): Overview of the Agency and Major Programs." Legislation. <https://www.congress.gov/crs-product/R46426>.
- Edwards, Jonathan, David Ovalle, dan Emily Davies. 2025. "Trump Signs Bill with Harsher Penalties for Dealers of Fentanyl Variants." The Washington Post, Juli 16. <https://www.washingtonpost.com/politics/2025/07/16/trump-halt-act-fentanyl-bill/>.
- Fallah, Giri Afif, dan Ika Riswanti Putranti. 2020. "Love Hate Relationship: Kebijakan Amerika Serikat Memberikan Bantuan Luar Negeri Kepada Meksiko Dalam Rangka Pemberantasan Drugs Trafficking Organizations." Journal of International Relations Diponegoro 6 (2): 2. <https://doi.org/10.14710/jirud.v6i2.27206>.
- Felbab, Vanda. 2017. "The Wall: The real costs of a barrier between the United States and Mexico." Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/the-wall-the-real-costs-of-a-barrier-between-the-united-states-and-mexico/>.
- FPC Briefing. 2017. "Trump Administration Efforts to Combat Drug Demand and the Opioid Crisis." United States Department of State. <https://2017-2021.state.gov/trump-administration-efforts-to-combat-drug-demand-and-the-opioid-crisis/>.
- General Services Administration & the Office of Management and Budget. 2021. "DHS." <https://www.performance.gov/homeland-security/>.
- Goodwin, Gretta L. 2018. Office of National Drug Control Policy and Other Agencies Need to Better Assess Strategic Efforts.
- Grindle, Merilee S. 2017. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton Legacy Library edition. Princeton University Press.
- Hartanto, Aprilliana Lista, Yusran Yusran, dan Syahrul Awal. 2022. Illegal Immigrant & Narcotics Smuggling.
- Haryono, Willy. 2017. "DEA: Kartel Meksiko Dominasi Pasar Narkoba AS." medcom.id, Oktober 24. <https://www.medcom.id/internasional/amerika/ZkeQnp5k-dea-kartel-meksiko-dominasi-pasar-narkoba-as>.

- Healthcare. 2017. "Council of Economic Advisers Report: the Underestimated Cost of the Opioid Crisis." <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/cea-report-underestimated-cost-opioid-crisis/>.
- Hendix, Steven E. 2007. "The Merida Initiative for Mexico and Central America: The New Paradigm for Security Cooperation, Attacking Organized Crime, Corruption and Violence." *Loyola University Chicago International Law Review* 5 (1).
- Herdiana, Iman. 2020. "Mengapa Negara Perlu Kelola Narkoba?" *Rumah Cemara*, Januari 6. <https://rumahcemara.or.id/mengapa-negara-perlu-kelola-narkoba/>.
- Hoffman, Jan. 2025. "Trump's Focus on Punishing Drug Dealers May Hurt Drug Users Trying to Quit." *Health*. *The New York Times*, Mei 13. <https://www.nytimes.com/2025/05/13/health/trump-drugs-treatment.html>.
- Hoke, Zlatica. 2017. "Trump Janjikan Langkah-langkah untuk Atasi Krisis 'Opioid.'" *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/3979781.html>.
- House, The White. 2025. "ONDCP Releases Trump Administration's Statement of Drug Policy Priorities." *The White House*, April 4. <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/04/ondcp-releases-trump-administrations-statement-of-drug-policy-priorities/>.
- ICJR. 2017. "Penanganan dan Dekriminalisasi Pengguna Narkotika dalam Revisi UU Narkotika." <https://icjr.or.id/penanganan-dan-dekriminalisasi-pengguna-narkotika-dalam-revisi-uu-narkotika/>.
- Idris, Muhammad, dan Benita L Togatorop. 2023. "Upaya Kerjasama Meksiko dan Amerika Serikat dalam Mengatasi Kartel Narkoba di Meksiko sebagai Transnational Organized Crime." *Global Political Studies Journal* 7 (2): 101–15. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i2.9591>.
- Jayanti, Hanifah Dwi. 2025. "Trump Terbitkan Perintah Eksekutif, Sejumlah Firma Hukum Besar AS Ditekan hingga Sepakat Bantu Pemerintah." *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/trump-terbitkan-perintah-eksekutif--sejumlah-firma-hukum-besar-as-ditekan-hingga-sepakat-bantu-pemerintah-lt67f7ac8f10606/>
- Jelita, Almira Farah, Khairur Rizki, dan Sirwan Yazid Bustami. 2020. "Analisis Kerja Sama Merida Initiative Antara Meksiko dan Amerika Serikat Dalam Mengurangi Drug Trafficking Organizations di Meksiko." *Indonesian Journal of Global Discourse* 2 (2): 52–73. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i2.23>.
- Lamas, Lorenzo. 2016. "Kerjasama Amerika Serikat – Meksiko Dalam Merida Initiative Untuk Menanggulangi Peredaran Narkotika." *Doctoral dissertation, Perpustakaan*.
- Longley, Robert. t.t. "Tentang Departemen Kehakiman AS (DOJ)." Diakses 20 Agustus 2025. <https://id.eferrit.com/tentang-departemen-kehakiman-as-doj/>.
- Maulana, Yati. 2025. "Pembekuan Bantuan Trump Ganggu Program Antinarkoba Di Pelabuhan Meksiko." <https://www.katakini.com/artikel/120994/pembekuan-bantuan-trump-ganggu-program-antinarkoba-di-pelabuhan-meksiko/>.
- McCAUL, MICHAEL T. t.t. *PREPARED BY THE MAJORITY STAFF OF THE*.

- Mediatama, Grahanusa. 2024. "Trump Ancam Tetapkan Kartel Narkoba Meksiko Sebagai Kelompok Teroris!" kontan.co.id, Desember 23. <https://internasional.kontan.co.id/news/trump-ancam-tetapkan-kartel-narkoba-meksiko-sebagai-kelompok-teroris>.
- Grindle, Merilee S. 2017. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton Legacy Library edition. Princeton University Press.
- Media, Kompas Cyber. 2023. "Belajar dari Perang Narkoba Abadi di Amerika Serikat." KOMPAS.com, Mei 11. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/11/15541361/belajar-dari-perang-narkoba-abadi-di-amerika-serikat>.
- Muslimin, Maulida Zahrani Putri, Agussalim Burhanuddin, dan Universitas Hasanuddin. 2024. ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DONALD TRUMP TERHADAP PERBATASAN AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL. 11 (01).
- National Center for Drug Abuse Statistics. 2022. "NCDAS: Substance Abuse and Addiction Statistics [2025]." NCDAS. <https://drugabusestatistics.org/>.
- National center for health statistic. 2021. "Drug Overdose Deaths in the U.S. Top 100,000 Annually." November 17. https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/nchs_press_releases/2021/20211117.htm.
- Ningrum, Canhayaningtyas Kusuma. 2023. "PERBANDINGAN KEBIJAKAN IMIGRASI AMERIKA SERIKAT DI PERBATASAN MEKSIKO - AS ERA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP." Digital Repository Unila.
- Nusa Bangsa, Ni Luh Damaitri. t.t. KEBIJAKAN AS-MEKSIKO DALAM UPAYA MEMBERANTAS DRUGS DI TAHUN 2007.
- Office of National Drug Control Policy. t.t. "The Administration's Strategy."
- Payan, Tony. 2006. *The three U.S.-Mexico border wars: drugs, immigration, and Homeland Security*. Praeger Security International.
- Permana, Muhammad Aji, dan Muhammad Arsy Ash Shiddidy. 2025. IMPLEMENTASI KERJASAMA MERIDA INITIATIVE DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA ILEGAL ANTARA AMERIKA DAN MEKSIKO (2008-2019). 11 (2).
- "Products - Vital Statistics Rapid Release - Provisional Drug Overdose Data." 2025. Agustus 7. <https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm>.
- Puspita, Retno Afifah. 2023. "KEBIJAKAN MEKSIKO UNTUK MENANDATANGANI MERIDA INITIATIVE UNTUK MENGHADAPI DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONS DENGAN AMERIKA SERIKAT DI MEKSIKO 2007- 2012." Universitas Islam Indonesia.
- Putri, Janardana, dan I Gde Putra Ariana. 2022. "EKSTRADISI DALAM MERESPON 'MEXICAN DRUG WAR': SOLUSI ATAU BUMERANG?" *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 10 (4): 407–22.
- Samosir, Efragil. 2014. EFEKTIVITAS KERJASAMA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA ILEGAL (MERIDA INITIATIVE) ANTARA PEMERINTAH MEKSIKO DAN AMERIKA SERIKAT (2007-2012).

- Sandiawan, Chikal. 2022. “Analisis Kebijakan Amerika Serikat Dalam Menangani Peredaran Narkotika Dari Kolombia Pada Masa Pemerintahan Barack Obama.”
- Saputra, Bayu. 2022. “ANALISIS PENGARUH PARTAI REPUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI ‘TRUMP WALL’ DI PERBATASAN AS – MEKSIKO.” *SIYAR Journal* 2 (1): 116–31. <https://doi.org/10.15642/siyar.2022.2.1.116-131>.
- Saputri, Delfira Harli. 2023. “Upaya Meksiko Dan Amerika Serikat Dalam Mengatasi Eksistensi Dto (Drugs Trade Organization) Kawasan Meksiko.” *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*.
- Saragih, Hendra Maujana, Muhammad Zulham, dan Laras Deaziska. 2021. “United States of America Policies in Managing Treats of Drugs from Mexico (2017-2019).” *Global Political Studies Journal* 5 (2): 88–105. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.5952>.
- Saraswita, Putu Intan, D A Wiwik Dharmiasih, dan S Ip. t.t. PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM KERJASAMA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN NARKOTIKA DI MEKSIKO 2007-2012.
- socialreco. 2024. “Trump’s Stance on Drugs Policies | Substance Abuse and Behavioral Health Services in NJ.” *Social Recovery Center*, November 1. <https://www.socialrecoverycenter.com/trump-s-drugs-policies>.
- Squeglia, L.M., J. Jacobus, dan S.F. Tapert. 2009. “The Influence of Substance Use on Adolescent Brain Development.” *Clinical EEG and Neuroscience* 40 (1): 31–38. <https://doi.org/10.1177/155005940904000110>.
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. 2023. *Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2022 National Survey on Drug Use and Health*.
- Syafira. 2025. “Program Antinarkoba Yang Didanai AS Di Meksiko Terancam Karena Bantuan Dihentikan.” *Jurnas.Com*. <https://www.jurnas.com/artikel/168984/Program-Antinarkoba-yang-Didanai-AS-di-Meksiko-Terancam-karena-Bantuan-Dihentikan/>.
- Taufik, Ranisa Esmeralda. 2019. “Kerjasama Anti-Perdagangan Narkoba Amerika Serikat dan Kuba Sebagai Isu Keamanan Nasional Pada Era Pemerintahan Donald J. Trump.” *Journal of International Relations* 5 (4): 718–26.
- Tempo. 2019. “Trump Bakal Umumkan Kartel Narkoba di Meksiko sebagai Teroris? | tempo.co.” *November* 27. <https://www.tempo.co/internasional/trump-bakal-umumkan-kartel-narkoba-di-meksiko-sebagai-teroris--680476>.
- The American Presidency Project. 2017. “Executive Order 13784—Establishing the President’s Commission on Combating Drug Addiction and the Opioid Crisis.” <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13784-establishing-the-presidents-commission-combating-drug-addiction-and>.
- The White House. 2025. “Statement of drug policy priorities.” *Conference paper presented pada Trump Administration’s Drug Policy Priorities, Office Of National Drug Control Policy. Executive Office Of The President*.
- The White House. t.t. “Office of National Drug Control Policy.” *Diakses 14 Agustus 2025*. <https://www.whitehouse.gov/ondcp/>.

- Tibben. 2017. “Apa Arti Pemerintahan Trump bagi Perjanjian Mérida? (Juli 2017) – CLAG.” Juli 15. <https://clagscholar.org/what-does-the-trump-administration-mean-for-the-merida-agreement/>.
- United States Department of State. t.t. “Ending the Opioid Crisis: International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking.” United States Department of State. Diakses 11 Juli 2025. <https://2017-2021.state.gov/ending-the-opioid-crisis-international-day-against-drug-abuse-and-illicit-trafficking/>.
- United States Drug Enforcement Administration. t.t. “Healthcare.” Diakses 12 Mei 2025. <https://www.dea.gov/about/mission>.
- “U.S. Department of Homeland Security (DHS) | USAGov.” t.t. Diakses 20 Agustus 2025. <https://www.usa.gov/agencies/u-s-department-of-homeland-security>.
- “U.S. Overdose Deaths In 2021 Increased Half as Much as in 2020 - But Are Still Up 15%.” 2022. Mei 11. https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/nchs_press_releases/2022/202205.htm.
- Valentine, Gabriella. 2018. “CMS Expands State Access to Medicaid Waivers for IMD Services | AHA News.” <https://www.aha.org/news/headline/2018-11-13-cms-expands-state-access-medicaid-waivers-imd-services>.
- Wayne, Earl Anthony, Cecilia Farfan, Vanda Felbab, dan Rafael Fernandez de Castro. 2019. “Tariffs won’t solve U.S.-Mexico drug crime.” Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/tariffs-wont-solve-u-s-mexico-drug-crime/>.

